

Kutipan
(Untuk Kepentingan Intern)



**RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
1994 / 95 - 1998 / 99**

**BAB 32
PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA**

**BAB 33
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

x. 133

Direktorat
Kebudayaan

8

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1994**

Kutipan
(Untuk Kepentingan Intern)



348.598
DEP
F

**RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
1994 / 95 - 1998 / 99**

**BAB 32
PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA**

**BAB 33
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1994**

Diperbanyak Oleh :
Proyek Survai dan Perencanaan Sektoral dan Regional
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993/1994)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1994**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
(REPELITA VI)**

1994/95 - 1998/99

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) telah berhasil menciptakan kerangka yang cukup mantap dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam Repelita V, maka ditetapkan Repelita VI sebagai awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan tugas yang diberikan Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994/95 - 1998/99);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99.**

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95 - 1998/99 sebagaimana termuat dalam

lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari pada Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dan Pembangunan Lima Tahun Keenam sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 1994**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.
Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan I**

cap/ttd.

Lambock V. Nahattands, S.H.

**RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
1994 / 95 – 1998 / 99**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1994
tentang
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
(REPELITA VI)**

BUKU

IV

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM 1994/95 - 1998/99

DAFTAR ISI

BUKU I

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Hasil Pembangunan Dalam Pembangunan
 Jangka Panjang Pertama
- Bab 3 Sasaran dan Kebijakan Pokok Dalam
 Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan
 Pembangunan Lima Tahun Keenam
- Bab 4 Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan
- Bab 5 Keuangan Negara
- Bab 6 Kebijakan Moneter dan Lembaga-lembaga
 Keuangan
- Bab 7 Neraca Pembayaran Internasional
- Daftar Singkatan dan Akronim

BUKU II

- Bab 8 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Bab 9 Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan
 Kemiskinan
- Bab 10 Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Bab 11 Pangan dan Perbaikan Gizi
- Bab 12 Pengembangan Usaha Nasional
- Bab 13 K o p e r a s i
- Bab 14 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Bab 15 Kelautan dan Kedirgantaraan
- Bab 16 Pembangunan Daerah
- Bab 17 Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
- Bab 18 Lingkungan Hidup
- Bab 19 Penataan Ruang dan Pertanahan
- Daftar Singkatan dan Akronim

BUKU III

- Bab 20 Industri
 - Bab 21 Pertanian
 - Bab 22 Pengairan
 - Bab 23 Perdagangan
 - Bab 24 Transportasi
 - Bab 25 Pertambangan
 - Bab 26 Kehutanan
 - Bab 27** Pariwisata
 - Bab 28 Pos dan Telekomunikasi
 - Bab 29 Transmigrasi
 - Bab 30 Energi
- Daftar Singkatan dan Akronim

BUKU IV

- Bab 31 A g a m a
 - Bab 32 Pendidikan dan Olahraga
 - Bab 33** Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - Bab 34 Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
 - Bab 35 Kesehatan
 - Bab 36 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
 - Bab 37 Peranan Wanita, Anak dan Remaja, dan Pemuda
 - Bab 38 Perumahan dan Permukiman
 - Bab 39 H u k u m
 - Bab 40 Politik Dalam Negeri
 - Bab 41 Hubungan Luar Negeri
 - Bab 42 Aparatur Negara
 - Bab 43 Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
 - Bab 44 Pertahanan Keamanan
 - Bab 45 Sistem Informasi dan Statistik
 - Bab 46 Sistem Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
- Daftar Singkatan dan Akronim

BUKU V

Bab 47 Pembangunan Daerah Tingkat I

1. Daerah Istimewa Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. R i a u
5. J a m b i
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Jawa Timur
14. Bali

Daftar Singkatan dan Akronim

BUKU VI

Bab 47 Pembangunan Daerah Tingkat I

15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Tengah
17. Kalimantan Selatan
18. Kalimantan Timur
19. Sulawesi Utara
20. Sulawesi Tengah
21. Sulawesi Tenggara
22. Sulawesi Selatan
23. Nusa Tenggara Barat
24. Nusa Tenggara Timur
25. Maluku
26. Irian Jaya
27. Timor Timur

Daftar Singkatan dan Akronim

BAB 32

PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

A. UMUM

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dan olahraga yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting. Melalui pembangunan pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani. Pembangunan olahraga dapat mendukung upaya pembentukan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Pembangunan pendidikan dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sudah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan akan terus ditingkatkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta secara terpadu.

Pemerataan pendidikan diutamakan pada jenjang pendidikan dasar yang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) akan ditingkatkan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Perhatian yang lebih besar akan diberikan kepada masyarakat yang bermukim di daerah terpencil dan penduduk yang kurang mampu. Aspek lain dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu, kesesuaian antara pendidikan dengan dunia kerja, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan yang semuanya diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam menghadapi PJP II.

Sejalan dengan pembangunan pendidikan, pembangunan olahraga yang juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditingkatkan dengan menitikberatkan pada pemasalan olahraga ke seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terselenggaranya pembangunan olahraga secara lebih mantap.

B. PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), dinyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan

mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menetapkan bahwa sasaran umum PJP II ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dan dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, UUSPN menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan ditetapkannya titik berat pembangunan dalam PJP II pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan makin menduduki peranan yang sangat penting dan strategis. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan wahana dan sekaligus cara untuk membangun manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Pendidikan diselenggarakan sejak usia dini sampai usia lanjut terus-menerus sehingga merupakan pendidikan seumur hidup. Hal ini sejalan dengan lingkup peningkatan kualitas SDM dalam PJP II yang mencakup seluruh proses dan siklus kehidupan manusia sejak

janin dalam kandungan, bayi, balita, prasekolah, remaja, pemuda, sampai dewasa dan usia lanjut.

Pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara ditingkatkan agar lebih bermutu dan secara merata dapat menjangkau seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil sehingga bangsa Indonesia lebih siap memasuki tahap tinggal landas dalam Repelita VI dan lebih tangguh memasuki masa kebangkitan nasional kedua dalam masa PJP II mendatang. Pemerataan pendidikan dengan tetap mempertimbangkan mutu semakin dirasakan penting dalam masa PJP II, yang akan ditandai dengan perubahan dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan. Makin kuatnya persaingan, makin cepatnya perkembangan iptek, serta makin derasny arus informasi dan pengaruh budaya dari luar, menuntut pembangunan pendidikan yang mampu mewujudkan manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri yang tanggap menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman dan tangguh menghadapi berbagai gejolak perubahan dengan bermodalkan ketahanan budaya dan agama.

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas SDM Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pembaruan kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan.

Selanjutnya, GBHN 1993 juga menggariskan bahwa dalam Repelita VI pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan

kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan memperhatikan perkembangan iptek. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengamalkannya sehingga terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas, dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.

Pembangunan pendidikan nasional dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional merupakan suatu pekerjaan besar. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pembangunan pendidikan berpegang teguh pada sembilan asas pembangunan nasional, yaitu asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, dan asas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pembangunan pendidikan, seluruh modal dasar pembangunan didayagunakan, terutama penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Upaya mendayagunakan modal dasar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap iptek serta kemungkinan pengembangannya. Dengan demikian, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek. Hal tersebut dilaksanakan dalam batas-batas

yang tidak merugikan kepentingan umum dan dengan mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Pembangunan pendidikan dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan pada pengarahannya-pengarahannya GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

II. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM PJP I

Selama PJP I pembangunan pendidikan menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pendidikan khususnya sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD-MI) telah diselenggarakan dengan lebih merata dan menjangkau hampir seluruh penduduk, termasuk masyarakat yang bermukim di daerah terpencil. Dengan adanya perluasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata yang diikuti pula dengan makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, jumlah peserta didik dan lulusan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk yang memperoleh pendidikan berarti meningkat pula kualitas SDM sehingga pada gilirannya berdampak pada peningkatan keberhasilan di berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, pembangunan pendidikan yang berbudaya di samping telah menghasilkan kader pembangunan, juga makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional.

Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan, dalam PJP I telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat sekolah dasar atau rasio murid sekolah dasar termasuk madrasah ibtidaiyah (SD-MI) yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun dari 41,4 persen pada tahun 1968/69 menjadi sekitar 93,5 persen pada tahun 1993/94. Angka

partisipasi kasar (APK) pada tingkat dasar atau rasio murid SD-MI terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun meningkat dari 68 persen menjadi 109,9 persen. Jumlah murid SD-MI meningkat menjadi hampir dua setengah kali lipat yaitu dari 12,3 juta orang pada tahun 1968 menjadi 29,5 juta orang pada tahun 1993/94. Dalam kurun waktu yang sama lulusan SD-MI meningkat menjadi lebih empat kali lipat, yaitu dari 928,6 ribu orang menjadi 3,8 juta orang. Keberhasilan tersebut dimungkinkan terutama berkat dilancarkannya program Inpres SD mulai tahun 1973/74 yang kemudian diikuti dengan pencanangan Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1984. Melalui program Inpres SD, sejak Repelita II sampai tahun 1992/93 telah dibangun lebih dari 146 ribu gedung SD baru dan sekitar 166 ribu buah tambahan ruang kelas serta sekitar 470 ribu rumah dinas guru. Selain itu, telah dicetak dan dibagikan sekitar 300 juta eksemplar buku.

Keberhasilan pemerataan pendidikan pada tingkat SD telah meningkatkan APK pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau rasio jumlah murid terhadap jumlah penduduk kelompok umur 13-15 tahun dari 16,9 persen pada tahun 1968/69 menjadi sekitar 53 persen pada tahun 1993/94. Jumlah murid SLTP termasuk murid madrasah tsanawiyah (MTs) telah meningkat dari sekitar 1,2 juta siswa menjadi hampir 7 juta siswa atau meningkat menjadi sekitar enam kali lipat. Lulusan SLTP juga meningkat dari hanya 306,9 ribu menjadi 1,9 juta. Sementara itu, murid sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang terdiri dari sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) juga telah meningkat menjadi delapan setengah kali lipat, yaitu dari 482 ribu siswa menjadi 4,1 juta siswa. Dengan demikian, APK tingkat SLTA meningkat dari 8,6 persen menjadi 33,2 persen dan lulusannya pun meningkat dari 100,3 ribu orang pada tahun 1968 menjadi 1,2 juta orang pada tahun 1993/94. Sejalan dengan itu, lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat dari 25,7 persen menjadi 41 persen sehingga jumlah mahasiswa meningkat dari hanya 156 ribu orang menjadi lebih dari 2,2 juta orang. Dengan

demikian, APK pada tingkat pendidikan tinggi meningkat dari 1,6 persen pada tahun 1968 menjadi 10,5 persen pada tahun 1993/94. Jumlah dosen meningkat dari 7,4 ribu orang menjadi sekitar 84,4 ribu dosen.

Dalam upaya menyiapkan tenaga terampil guna memenuhi kebutuhan industri, pertanian, dan dunia usaha lainnya telah dikembangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik. Pembangunan pendidikan SMK untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Sebelum PJP I jenis dan jumlahnya masih terbatas pada sekolah teknik, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga dengan jumlah hanya 410 sekolah. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor termasuk pertanian, industri, dan jasa, selama PJP I jenis sekolah menengah teknologi bertambah dengan berbagai bidang lain seperti teknik penerbangan, pertanian, dan kesenian dengan jumlah sebanyak 681 sekolah negeri dan 2.837 sekolah swasta yang tersebar di semua propinsi. Jumlah peserta didik pada tahun 1993/94 di SMK negeri adalah sekitar 476 ribu dan SMK swasta sekitar 889 ribu orang, sedangkan lulusannya berturut-turut sekitar 130 ribu dan 235 ribu orang. Dari sebanyak 681 sekolah negeri tersebut terdapat 267 sekolah (39 persen) yang tergolong berfungsi baik dan dapat menampung sekitar 192 ribu siswa serta meluluskan tamatan sekitar 58 ribu orang per tahun. Adapun SMK swasta yang dapat menyamai mutu SMK negeri yang baik baru berjumlah sekitar 6 persen dengan kemampuan menghasilkan lulusan sekitar 14 ribu orang. Dengan demikian, SMK negeri dan swasta bermutu baik dapat menghasilkan lulusan sekitar 72 ribu orang.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dilakukan pula melalui program diploma termasuk politeknik yang dirintis mulai Repelita II. Pada akhir PJP I program diploma telah diselenggarakan oleh hampir semua perguruan tinggi negeri. Politeknik pertanian terdapat di enam lokasi, politeknik keteknikan (*engineering*) terdapat di 18

lokasi, dan politeknik bisnis (*commerce*) termasuk pariwisata terdapat di sembilan lokasi. Politeknik pertanian mengelola program studi seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Politeknik bisnis, antara lain mengelola program studi akuntansi, kesekretarian, dan pariwisata, sedangkan politeknik keteknikan, antara lain mengelola program studi listrik, mesin, sipil, dan perkapalan. Jumlah mahasiswa program diploma terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir Repelita II baru terdaftar sebanyak 12,6 ribu mahasiswa atau hanya sekitar 3 persen dari jumlah mahasiswa keseluruhan, sedangkan pada akhir Repelita V jumlah mahasiswa program diploma meningkat menjadi 469,1 ribu orang atau sekitar 20,5 persen dari jumlah mahasiswa keseluruhan. Lulusan yang dihasilkan sekitar 50,6 ribu orang dengan berbagai keahlian, baik pertanian dan keteknikan maupun kesenian, sosial, dan kependidikan.

Keberhasilan lain dalam PJP I adalah berkembangnya program pascasarjana untuk magister dan doktor yang dirintis sejak tahun 1975. Pada tahun 1993 terdapat sebanyak 14 perguruan tinggi negeri (PTN) yang melaksanakan program magister dan 10 PTN yang melaksanakan program doktor. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) telah pula merintis program magister. Peserta program pascasarjana pada umumnya adalah dosen PTN dan PTS serta tenaga peneliti pada berbagai lembaga penelitian departemen dan lembaga penelitian nondepartemen. Peserta program pendidikan pascasarjana tersebut meningkat pesat dari hanya sekitar 160 orang pada tahun 1978/79 menjadi sekitar 8 ribu orang pada tahun 1993/94. Hal ini berarti terdapat peningkatan yang sangat bermakna dalam pengembangan SDM iptek. Dengan demikian, penyelenggaraan program pascasarjana secara langsung telah mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan penelitian di Indonesia sehingga lebih mampu mendorong pengembangan iptek dan mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Selain itu, perhatian terhadap anak-anak yang kurang beruntung, yaitu mereka yang miskin, tinggal di daerah terpencil, dan penyandang cacat, telah diberikan secara sungguh-sungguh. Bagi masyarakat daerah terpencil diselenggarakan SD Kecil dan sistem guru kunjung. Tunjangan pengabdian diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil sebagai suatu bentuk penghargaan. Pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat fisik atau mental diberikan melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa (SLB). Khusus untuk SLB, ada peningkatan jumlah sekolah yaitu dari 67 sekolah pada awal PJP I menjadi 526 sekolah pada akhir PJP I atau meningkat menjadi hampir delapan kali lipat. Jumlah peserta didik yang dilayani meningkat menjadi sepuluh kali lipat dari sekitar 2.500 orang menjadi lebih dari 25 ribu orang. Dalam pada itu, kepada murid yang berprestasi yang berasal dari keluarga miskin disediakan beasiswa untuk membantu kelancaran sekolah.

Sementara itu, untuk memberi kesempatan menikmati pendidikan kepada penduduk yang tidak mampu bersekolah terutama karena kemiskinan, dalam PJP I dilancarkan pula program pendidikan luar sekolah (PLS) dengan menyelenggarakan program kelompok belajar Paket A, kelompok belajar Paket B, kelompok belajar usaha, dan magang. Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan untuk memberantas tiga buta, yaitu buta aksara Latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar serta memberi bekal keterampilan berusaha. Program kelompok belajar Paket A terdiri dari dua jenis, yaitu Paket A tidak setara SD dan Paket A setara SD. Paket A tidak setara SD ditujukan terutama untuk memberantas buta aksara. Paket A setara SD ditujukan agar warga belajar dapat memperoleh pendidikan setara SD, sedangkan kelompok belajar Paket B untuk memperoleh pendidikan setara SLTP. Peserta dan lulusan kelompok belajar Paket A dan Paket B dapat mengikuti program kelompok belajar usaha yang ditujukan untuk memberikan bekal keterampilan berwiraswasta. Melalui program magang warga belajar PLS diberi kesempatan untuk belajar pada suatu perusahaan

misalnya di usaha pertukangan atau industri kerajinan rakyat. Penyelenggaraan program PLS terutama Paket A telah berhasil menurunkan angka buta aksara pada penduduk umur 10 tahun ke atas, yaitu dari 39,1 persen pada awal PJP I menjadi 15,8 persen pada tahun 1990. Penurunan angka buta aksara tersebut lebih nyata pada kelompok wanita, yaitu dari 53,1 persen pada tahun 1971 menjadi 21,3 persen pada tahun 1990, sedangkan untuk pria turun dari 27,9 persen menjadi 10,4 persen. Di samping itu, PLS juga telah berhasil mengembangkan kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha bagi warga masyarakat yang kurang beruntung karena putus sekolah atau bahkan tidak pernah mampu bersekolah. Melalui berbagai kegiatan, PLS telah berhasil meningkatkan minat belajar dan minat baca masyarakat. Penghargaan internasional yang diberikan menggambarkan bukti keberhasilan Indonesia dalam memperluas kesempatan belajar bagi penduduk dalam rangka pendidikan untuk semua.

Di samping penurunan jumlah wanita yang buta aksara, kemajuan besar ditunjukkan pula dengan menurunnya kesenjangan pendidikan antara laki-laki dengan wanita. Seperti terlihat pada Tabel 32-1, pada tahun 1980 jumlah penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang tamat SD adalah sekitar 9,54 juta orang, sedangkan laki-laki sekitar 12 juta atau rasionya adalah sebesar 0,79. Pada tahun 1990 rasio tersebut meningkat menjadi 0,93 yang berarti penduduk wanita dan laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat SD telah hampir sama jumlahnya. Perkembangan kemajuan tersebut terutama merupakan hasil dari program Inpres SD dan Wajib Belajar Enam Tahun. Penurunan kesenjangan terjadi pula pada jenjang pendidikan SLTP, SLTA, dan PT. Dalam kurun waktu yang sama, rasio untuk jenjang SLTP meningkat dari 0,66 menjadi 0,80, untuk jenjang SLTA dari 0,53 menjadi 0,67, dan untuk jenjang PT dari 0,33 menjadi 0,53. Secara keseluruhan, rasio untuk jenjang SLTP ke atas meningkat dari 0,59 pada tahun 1980 menjadi 0,72 pada tahun 1990. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan SLTP atau lebih tinggi telah

meningkat dari sekitar 4,18 juta pada tahun 1980 menjadi sekitar 12,39 juta pada tahun 1990 atau meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional swasta berperan besar. Data tahun 1992/93 memperlihatkan bahwa peranan swasta pada jenjang SLTP dan SLTA yang ditunjukkan oleh proporsi jumlah sekolah swasta terhadap jumlah sekolah keseluruhan adalah sekitar 66 persen dan 75 persen. Peranan swasta sangat menonjol pada jenjang pendidikan tinggi dengan jumlah lebih dari 1.000 PTS dibandingkan dengan hanya 63 PTN.

Kemajuan yang amat mendasar pula adalah ditetapkannya UUSPN berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Dengan adanya perangkat peraturan perundang-undangan tersebut, dalam memasuki PJP II diharapkan penyelenggaraan pendidikan nasional dapat berjalan dengan lebih mantap dan terarah.

Keberhasilan pembangunan pendidikan telah mendukung keberhasilan di sektor lain. Meningkatnya pengetahuan masyarakat berkat pendidikan, antara lain berdampak pada peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian bayi dan balita, dan peningkatan angka harapan hidup penduduk. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ditinjau dari perbaikan struktur pendidikan angkatan kerja, pembangunan pendidikan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti walaupun belum memuaskan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 1980 sampai 1990 persentase angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah menurun dari 67 persen menjadi 45,6 persen, sedangkan yang berpendidikan SLTP ke atas meningkat dari 11,5 persen menjadi 22,7 persen. Perbaikan struktur pendidikan angkatan kerja tersebut pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan penduduk.

TABEL 32-1
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 1992/93

Pendidikan Tertinggi Yang Ditematkan	1980				1990			
	Laki-laki (L)	Wanita (W)	Jumlah	Rasio W : L	Laki-laki (L)	Wanita (W)	Jumlah	Rasio W : L
SD	12.001.444	9.536.396	21.537.840	0,79	21.192.895	19.803.539	40.996.434	0,93
SLTP	3.758.679	2.477.782	6.236.461	0,66	8.048.032	6.433.065	14.481.097	0,80
SLTA	2.963.663	1.573.512	4.537.175	0,53	7.836.321	5.251.122	13.087.443	0,67
PT	381.415	126.758	508.173	0,33	1.335.339	704.666	2.040.005	0,53
SLTP ke atas	7.103.757	4.178.052	11.281.809	0,59	17.219.692	12.388.853	29.608.545	0,72

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Selama PJP I pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa, dan membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dalam PJP II pembangunan pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi. Namun, disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya akan dihadapi berbagai tantangan dan kendala di samping ada pula peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Meskipun pembangunan pendidikan telah mencapai banyak keberhasilan selama PJP I, masih ada beberapa masalah penting yang belum terselesaikan dan juga muncul berbagai masalah baru yang perlu dipecahkan dalam PJP II. Secara umum tantangan pembangunan pendidikan dalam PJP II adalah bagaimana membangun sistem pendidikan nasional agar lebih mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri serta tanggap menghadapi perkembangan zaman, perkembangan iptek, dan tuntutan pembangunan nasional.

Dalam PJP II, transformasi struktur ekonomi nasional dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri dan jasa akan makin nyata. Sejalan dengan itu, tenaga kerja profesional akan makin dibutuhkan guna mendukung pengembangan industri dan jasa di berbagai sektor, serta dunia usaha dan dalam rangka meningkatkan daya saing di pasaran dunia. Pembangunan pendidikan dalam PJP I belum sepenuhnya dapat mengimbangi tuntutan tersebut. Jumlah dan jenis lulusan pendidikan kejuruan di tingkat menengah dan pendidikan profesional di tingkat pendidikan tinggi belum sepenuhnya sepadan dengan kebutuhan tenaga ahli dan terampil dalam berbagai bidang pembangunan. Keselarasan antara perencanaan pendidikan dan pengadaan tenaga kerja menjadi makin penting. Keadaan dan kecenderungan tersebut membangkitkan tantangan bagi pembangunan pendidikan nasional

untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan profesional yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan pembangunan.

Memasuki PJP II yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan global, bangsa Indonesia harus tanggap dan tangguh menghadapi berbagai gejolak dan perubahan serta mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini memerlukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang salah satu tolok ukurnya adalah tingkat pendidikan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rakyat Indonesia dewasa ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan bangsa lain yang juga baru saja melepaskan diri dari belenggu keterbelakangannya. Misalnya, angka partisipasi pendidikan pada tingkat SLTP termasuk MTs sebesar 53 persen yang dicapai Indonesia pada akhir PJP I telah dicapai Malaysia sekitar 15 tahun yang lalu dan Korea Selatan sekitar 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, peningkatan derajat pendidikan bangsa Indonesia agar serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP merupakan prasyarat penting untuk memasuki tahap kebangkitan nasional kedua dalam PJP II dan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Sehubungan dengan itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan dalam PJP II adalah menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan sebaik-baiknya agar terwujud pemerataan pendidikan dasar yang bermutu.

Kesenjangan tingkat kemajuan dan mutu pendidikan juga tampak pada tingkat SLTA. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Korea, dan Thailand, APK SLTA Indonesia tertinggal sekitar 15-20 tahun. Sistem dan proses belajar-mengajar di SMU dewasa ini masih belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah mewujudkan pendidikan di SMU yang lebih

merata dan bermutu sehingga lulusannya lebih mampu melanjutkan pendidikan ke PT guna mendukung tercapainya kualitas SDM yang andal.

Dalam PJP II peranan iptek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industri, dan semua sektor pembangunan lainnya akan makin menonjol. Pendekatan pembangunan yang semata-mata mengandalkan kepada sumber daya alam sudah tidak tepat lagi karena sumber daya alam terutama yang bersifat tak terbarukan akan semakin terbatas. Pembangunan harus makin mengandalkan SDM yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek. Semua itu menuntut perlunya pengembangan SDM iptek melalui pembangunan pendidikan yang lebih terarah.

Pendidikan tinggi merupakan wahana untuk menghasilkan SDM iptek yang andal. Ditinjau dari kepentingan ini, masalah yang dihadapi adalah masih rendahnya angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 1993/94, APK pendidikan tinggi baru mencapai 10,5 persen yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Taiwan, dan Korea. Oleh karena itu, dalam PJP II, angka partisipasi pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah rendahnya daya tampung perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yaitu baru sekitar 41 persen lulusan SLTA yang dapat ditampung setiap tahunnya. Sementara itu, ditinjau dari komposisi bidang ilmu di tingkat pendidikan tinggi, terdapat ketimpangan antara program studi sains dan keteknikan termasuk pertanian dengan program studi ilmu-ilmu sosial. Dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas, upaya untuk membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi yang lebih bermutu dengan bidang studi yang lebih berimbang antara sains dan keteknikan dengan sosial dan humaniora, merupakan tantangan pula dalam pembangunan pendidikan.

Masalah lain yang dihadapi adalah masih cukup besarnya jumlah murid yang putus sekolah di sekolah dasar atau bahkan tidak pernah sekolah, sehingga menyebabkan masih banyak yang menderita tiga buta. Menurut sensus penduduk tahun 1990, penduduk berumur sepuluh tahun ke atas yang buta aksara masih berjumlah sekitar 21,5 juta orang yang terdiri dari 6,9 juta laki-laki dan 14,6 juta wanita. Sebagian besar di antaranya, yaitu sekitar 18 juta orang bermukim di perdesaan dan pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Memasuki PJP II masalah ini harus diatasi secara tuntas. Sehubungan dengan itu, merupakan tantangan pula bagi pembangunan pendidikan untuk membebaskan penduduk dari tiga buta dan sekaligus memberikan bekal keterampilan berwiraswasta sebagai bagian penting dari upaya mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Menyimak berbagai masalah dan tantangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pembangunan pendidikan merupakan tugas yang besar dan berat sehingga tanggung jawabnya tidak hanya terletak pada Pemerintah. Dalam UUSPN tahun 1989 ditegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam PJP I sudah cukup besar antara lain dengan banyaknya sekolah swasta, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Namun, kualitas pendidikan yang diselenggarakan masyarakat pada umumnya masih rendah. Dalam kaitan ini, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di perguruan swasta pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Pendidikan menghasilkan lulusan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui karya dan pengabdianya. Dunia usaha adalah kelompok masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari hasil pendidikan, terutama pendidikan kejuruan dan keahlian. Oleh karena itu, diperlukan keterkaitan dan kerja sama

antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan agar lulusan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja serta lebih mampu menciptakan kesempatan kerja secara mandiri. Peranan dunia usaha dalam upaya perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan, baik secara langsung dengan menyelenggarakan suatu satuan pendidikan maupun melalui penyediaan bantuan biaya, fasilitas praktikum atau penyediaan fasilitas magang bagi peserta didik. Namun, dewasa ini peran serta dunia usaha dalam pembangunan pendidikan masih terbatas. Dengan demikian, pembangunan pendidikan juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha yang lebih aktif dan terarah dalam peningkatan pemerataan serta mutu pendidikan, dengan mencegah kemungkinan timbulnya komersialisasi dan eksklusivisme dalam pendidikan.

Di samping itu, pembangunan pendidikan masih menghadapi masalah rendahnya mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya yang antara lain disebabkan oleh kurangnya minat lulusan SLTA terutama yang berprestasi tinggi untuk memilih bidang pendidikan keguruan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya penghasilan guru dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya formasi, serta dirasakan kurang terjaminnya pengembangan karier terutama bagi yang bertugas di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Sehubungan dengan itu, tantangan yang dihadapi adalah membangun sistem pendidikan, pengadaan, penempatan, serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya agar dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan.

Upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan kesesuaian, dan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan saat ini masih menghadapi masalah rendahnya efisiensi, yang antara lain ditunjukkan oleh tingginya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Di samping itu, manajemen pendidikan belum sepenuhnya dapat dilakukan secara

profesional, baik pada satuan pendidikan maupun pada sistem pendidikan secara keseluruhan di pusat maupun di daerah. Dalam kaitan ini, tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Kendala

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas ditemui kendala yang dapat menjadi penghambat bagi upaya pembangunan pendidikan. Kendala yang menonjol adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang pada umumnya bermukim di desa tertinggal berakibat pada terbatasnya daya jangkau pendidikan. Keluarga miskin tidak mampu membiayai pendidikan yang menurut ukuran kemampuannya sangat memberatkan. Cara pandang yang kurang positif terhadap arti pendidikan juga ada pada keluarga dan masyarakat miskin yang pada umumnya berpendidikan rendah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak menjamin perbaikan taraf hidup, khususnya ada anggapan bahwa tamatan SLTP tidak terjamin untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari pada hanya tamatan SD. Cara pandang seperti ini berakibat pada keengganan untuk menyekolahkan anak sampai ke SLTP. Keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin juga mendorong anak usia sekolah SD dan SLTP untuk bekerja.

Kendala lain yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah terbatasnya jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu; distribusi guru yang tidak merata, baik antardaerah maupun antarbidang studi; kurikulum yang dirasa terlalu padat, kurang fungsional dan banyak duplikasi; metode belajar-mengajar yang kurang sesuai terutama ditinjau dari perkembangan jiwa peserta didik, isi kurikulum dan tujuan pendidikan; dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku perpustakaan dan peralatan pendidikan baik jumlah maupun mutunya. Di samping itu, sistem manajemen pendidikan terutama kurang akuratnya

pendataan dan lemahnya koordinasi dan pengawasan, belum mendukung upaya peningkatan mutu.

Dalam hal pendidikan kejuruan dan keahlian, kendala yang dihadapi adalah masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan menengah umum lebih bergengsi. Di samping itu, belum terwujud suatu sistem pembakuan keprofesian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan kejuruan. Dalam upaya pengentasan masyarakat dari tiga buta, masih dijumpai kurangnya semangat dan motivasi belajar, terutama pada kelompok usia dewasa. Kendala lain adalah terbatasnya sarana perhubungan terutama di pulau-pulau yang terpencil sehingga penduduknya sukar menjangkau pelayanan pendidikan.

3. Peluang

Walaupun masih banyak ditemukan kendala yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pembangunan pendidikan guna menjawab berbagai tantangan masa depan yang semakin beragam dan kompleks, cukup ada peluang yang dapat mendukung pembangunan pendidikan.

Keberhasilan Wajib Belajar Enam Tahun membuka peluang bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pembangunan dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat pada umumnya akan pentingnya pendidikan merupakan peluang yang sangat berarti dalam pembangunan pendidikan.

Di samping itu, perkembangan iptek yang pesat dapat berguna sebagai pemacu untuk mengejar ketinggalan dan juga sebagai wahana bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan sarana komunikasi sebagai penyebar informasi mendukung pengembangan teknologi pendidikan. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, telah tersebar di semua

propinsi sehingga membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menikmati pendidikan. Adanya UUSPN berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional makin memperkuat upaya pembangunan pendidikan di masa depan.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.

Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan, dan dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.

Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antarberbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antardaerah. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan iptek serta tuntutan perkembangan pembangunan. Perlu pula terus dikembangkan kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan perencanaan tenaga kerja nasional.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.

Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan pendidikan prasekolah, di samping sebagai wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar, dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta.

Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu bekerja dan berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.

Pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan berketerampilan dasar sebagai

bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal hidup dalam masyarakat.

Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berketerampilan. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam masyarakat.

Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan iptek, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan iptek di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian Indonesia.

Perguruan tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang iptek, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya

untuk berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, terus dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggung jawab dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan iptek serta kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional.

Perguruan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa iptek. Perlu terus ditingkatkan dan diperluas penerapan dan penggunaannya sehingga menjangkau seluruh masyarakat tanpa mengabaikan pengembangan bahasa daerah sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia. Perlu pula ditingkatkan kemampuan penggunaan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat internasional.

Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. Kualitas pendidikannya ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dalam jumlah yang memadai. Pengembangan karier dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya, termasuk penghargaan bagi yang berprestasi dan yang bertugas di daerah terpencil, ditingkatkan serta

penempatannya disebar merata di seluruh tanah air sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.

Pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan wahana utama pendidikan, diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan bangsa dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan iptek. Kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam (IPA) dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang.

Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan pelatihan, media pengajaran, teknologi pendidikan, serta fasilitas pendidikan jasmani dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk membantu terselenggaranya dan meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan serta kebutuhan pembangunan.

Penulisan, penerjemahan, dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebar merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan arahan GBHN dan sasaran pembangunan pada PJP II yang dimulai pada Repelita VI serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, diproyeksikan sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut.

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan pendidikan dalam PJP II sesuai amanat GBHN 1993 adalah terselenggaranya pendidikan nasional yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, dan profesional.

Dalam usaha mencapainya, salah satu sasaran pokok pembangunan pendidikan dalam PJP II adalah tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang akan diupayakan terlaksana dalam tiga Repelita. Hal ini akan ditunjukkan dengan meningkatnya APK pendidikan dasar menjadi sekitar 117 persen pada akhir PJP II untuk SD dan MI (SD-MI), dan sekitar 118 persen untuk SLTP dan MTs. Begitu pula APK pendidikan menengah akan ditingkatkan menjadi 80 persen untuk SLTA dan madrasah aliyah (MA), dan untuk perguruan tinggi (PT) termasuk perguruan tinggi agama (PTA) menjadi 25 persen (Tabel 32-2).

Untuk mendukung sasaran tersebut, menjadi sasaran pula meningkatnya mutu guru, yang pada akhir PJP II semua guru SD-MI telah mempunyai kualifikasi serendah-rendahnya setara D-2 dan guru SLTP dan SLTA serendah-rendahnya S-1. Pada tingkat PT, proporsi dosen berkualifikasi S-2 dan S-3 menjadi sekitar 80 persen, dan jumlah mahasiswa program ilmu-ilmu sosial termasuk kependidikan dan humaniora terhadap jumlah mahasiswa ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta mencapai rasio yang lebih serasi dan seimbang.

TABEL 32-2
SASARAN PARTISIPASI PENDIDIKAN
DALAM PJP II
(persen)

Jenis Sasaran	Akhir Repelita V 1)	PJP II				
		Akhir Repelita VI	Akhir Repelita VII	Akhir Repelita VIII	Akhir Repelita IX	Akhir Repelita X
1 Sekolah dasar (SD) 2)	109,9	114,9	117,0	118,0	118,0	117,0
2 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 3)	52,7	66,2	87,0	108,0	114,0	118,0
3 Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 4)	33,2	40,5	51,0	60,0	71,0	80,0
4 Perguruan tinggi (PT) 5)	10,5	12,8	15,0	19,0	21,0	25,0

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)

2) Angka partisipasi kasar tahunan, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)

3) Angka partisipasi kasar tahunan, termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs)

4) Angka partisipasi kasar tahunan, termasuk Madrasah Aliyah (MA)

5) Angka partisipasi kasar tahunan, termasuk perguruan tinggi agama (PTA)

Upaya pembebasan tiga buta yaitu buta aksara Latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar akan dituntaskan dalam PJP II. Sementara itu, peran serta masyarakat menjadi lebih aktif dan terarah dalam upaya peningkatan perluasan dan kualitas pendidikan. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan sudah terwujud secara nyata.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan pendidikan dalam Repelita VI sesuai amanat GBHN 1993 adalah mantapnya penataan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan.

Sehubungan dengan itu, dalam Repelita VI salah satu sasaran pula adalah terwujudnya keterkaitan dan kesepadanan yang lebih serasi antara pendidikan dengan dunia kerja.

Dalam hal pemerataan pendidikan, pada akhir Repelita VI jumlah peserta didik di setiap jenis dan jenjang pendidikan semakin meningkat. Angka partisipasi kasar (APK) SD termasuk MI sekitar 115 persen, APK SLTP termasuk MTs lebih dari 66 persen, APK SLTA termasuk MA sekitar 41 persen, dan APK PT termasuk PTA sekitar 13 persen (Tabel 32-3 sampai dengan Tabel 32-6).

Dengan tercapainya APK SD dan SLTP tersebut jumlah murid SD-MI diperkirakan mencapai sekitar 29,4 juta, yang terdiri atas 25,9 juta murid SD dan 3,5 juta murid MI. Anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah akan berkurang jumlahnya dari sekitar 1 juta orang pada tahun 1993/94 menjadi sekitar 666 ribu pada tahun

TABEL 32-3
SASARAN MURID SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
1994/95 - 1998/99

Jenis Sasaran	Satuan	Akhir Repelita V 1)	Repelita VI				
			1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
1. Penduduk 7-12 Tahun 2)	ribu orang	26.810,3	26.599,3	26.321,4	26.019,7	25.772,5	25.580,3
2. Murid baru Tingkat I	ribu orang	4.865,5	4.847,9	4.817,8	4.783,0	4.757,9	4.742,7
a. SD	ribu orang	4.227,9	4.214,5	4.190,2	4.161,8	4.141,8	4.130,4
b. MI	ribu orang	637,6	633,4	627,6	621,2	616,1	612,3
3. Murid	ribu orang	29.461,8	29.350,7	29.284,2	29.314,1	29.354,8	29.398,4
a. SD	ribu orang	26.189,8	26.050,9	25.948,1	25.937,1	25.933,2	25.929,1
b. MI	ribu orang	3.272,0	3.299,8	3.336,1	3.377,0	3.421,6	3.469,3
4. Murid kelompok usia	ribu orang	29.461,8	29.350,8	29.284,2	29.314,1	29.354,9	29.398,4
a. <= 6 tahun	ribu orang	2.215,9	2.258,3	2.419,0	2.697,2	2.942,5	3.144,1
b. 7- 12 tahun	ribu orang	25.064,5	24.912,9	24.684,2	24.427,3	24.213,3	24.045,5
c. >= 13 tahun	ribu orang	2.181,4	2.179,6	2.181,0	2.189,6	2.199,1	2.208,8
5. Lulusan	ribu orang	3.837,2	3.932,1	3.977,6	3.984,8	4.031,0	4.093,2
a. SD	ribu orang	3.468,7	3.559,9	3.600,0	3.600,8	3.639,9	3.694,6
b. MI	ribu orang	368,5	372,2	377,6	384,0	391,1	398,6
6. Angka partisipasi murni 3)	%	93,49	93,66	93,78	93,88	93,95	94,00
7. Angka partisipasi kasar 4)	%	109,9	110,3	111,3	112,7	113,9	114,9
a. SD	%	97,7	97,9	98,6	99,7	100,6	101,4
b. MI	%	12,2	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)

2) Proyeksi Penduduk, BPS (1993)

3) Angka partisipasi murni (APM) = $\frac{\text{Jumlah murid SD + MI berusia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$

4) Angka partisipasi kasar (APK) = $\frac{\text{Jumlah murid SD + MI}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$

TABEL 32-4
SASARAN MURID SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
 1994/95-1998/99

Jenis Sasaran	Satuan	Akhir Repelita V 1)	Repelita VI				
			1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
1. Penduduk 13-15 Tahun 2)	ribu orang	13.243,7	13.405,3	13.484,4	13.499,1	13.415,2	13.262,0
2. Lulusan SD-MI	ribu orang	3.837,2	3.932,1	3.977,6	3.984,8	4.031,0	4.093,2
a. SD	ribu orang	3.468,7	3.559,9	3.600,0	3.600,8	3.639,9	3.694,6
b. MI	ribu orang	368,5	372,2	377,6	384,0	391,1	398,6
3. Murid baru tingkat I	ribu orang	2.556,3	2.690,5	2.795,4	2.851,2	2.968,0	3.095,4
a. SLTP	ribu orang	2.153,9	2.268,2	2.357,9	2.406,2	2.506,1	2.615,1
b. MTs	ribu orang	402,4	422,3	437,5	445,0	461,9	480,3
4. Murid	ribu orang	6.976,1	7.343,9	7.788,8	8.121,1	8.440,8	8.778,7
a. SLTP	ribu orang	5.746,3	6.049,2	6.434,4	6.718,9	6.990,3	7.278,5
b. MTs	ribu orang	1.229,8	1.294,7	1.354,4	1.402,2	1.450,5	1.500,2
5. Murid kelompok usia	ribu orang	6.976,1	7.344,0	7.788,8	8.121,1	8.440,7	8.778,7
a. <= 12 tahun	ribu orang	706,8	740,6	781,7	811,2	839,1	868,6
b. 13-15 tahun	ribu orang	5.279,4	5.524,1	5.823,1	6.034,8	6.234,2	6.444,5
c. >= 16 tahun	ribu orang	989,9	1.079,3	1.184,0	1.275,1	1.367,4	1.465,6
6. Murid SLTP	ribu orang	5.746,3	6.049,3	6.434,4	6.718,9	6.990,2	7.278,5
a. Negeri	ribu orang	3.759,5	3.956,0	4.206,0	4.390,1	4.565,4	4.751,6
b. Swasta	ribu orang	1.986,8	2.093,3	2.228,4	2.328,8	2.424,8	2.526,9
7. Lulusan	ribu orang	1.924,9	1.963,2	2.019,8	2.213,1	2.370,6	2.505,4
a. SLTP	ribu orang	1.615,7	1.632,7	1.667,5	1.839,9	1.979,4	2.095,6
b. MTs	ribu orang	309,2	330,5	352,3	373,2	391,2	409,8
8. Angka partisipasi murni 3)	%	39,9	41,2	43,2	44,7	46,5	48,6
9. Angka partisipasi kasar 4)	%	52,7	54,8	57,8	60,2	62,9	66,2
a. SLTP	%	43,4	45,1	47,7	49,8	52,1	54,9
b. MTs	%	9,3	9,7	10,0	10,4	10,8	11,3
10. Angka melanjutkan ke SLTP+MTs	%	66,6	68,4	70,3	71,6	73,6	75,6

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)

2) Proyeksi Penduduk BPS (1993)

3) Angka partisipasi murni (APM) = $\frac{\text{Jumlah murid SLTP+MTs berusia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$

4) Angka partisipasi kasar (APK) = $\frac{\text{Jumlah murid SLTP+MTs}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$

TABEL 32-5
SASARAN MURID SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN
MADRASAH ALIYAH (MA)
1994/95-1998/99

Jenis Sasaran	Satuan	Akhir Repelita V 1)	Repelita VI				
			1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
1. Penduduk usia 16-18 tahun 2)	ribu orang	12.378,7	12.708,5	12.977,0	13.196,6	13.357,0	13.460,0
2. Lulusan SMP + MTs	ribu orang	1.924,9	1.963,2	2.019,8	2.213,1	2.370,6	2.505,4
a. SMP	ribu orang	1.615,7	1.632,7	1.667,5	1.839,9	1.979,4	2.095,6
b. MTs	ribu orang	309,2	330,5	352,3	373,2	391,2	409,8
3. Murid baru tingkat I SLTA	ribu orang	1.497,8	1.543,9	1.605,5	1.777,6	1.924,0	2.054,4
a. SMU	ribu orang	847,0	867,7	896,8	987,0	1.062,0	1.127,4
b. SMK	ribu orang	519,7	541,8	569,6	637,4	697,0	751,6
c. MA	ribu orang	131,1	134,4	139,1	153,2	165,0	175,4
4. Murid SLTA	ribu orang	4.108,5	4.247,6	4.384,5	4.667,6	5.033,5	5.452,5
a. SMU	ribu orang	2.339,5	2.380,0	2.451,2	2.591,7	2.781,6	3.002,0
- Negeri	ribu orang	1.312,8	1.335,0	1.374,4	1.452,5	1.558,3	1.681,1
- Swasta	ribu orang	1.026,7	1.045,0	1.076,8	1.139,2	1.223,3	1.320,9
b. SMK	ribu orang	1.366,3	1.443,4	1.488,8	1.612,1	1.770,2	1.952,5
- Negeri	ribu orang	476,4	503,1	518,7	561,4	616,3	679,5
- Swasta	ribu orang	889,9	940,3	970,1	1.050,7	1.153,9	1.273,0
c. MA	ribu orang	402,7	424,2	444,5	463,8	481,7	498,0
5. Lulusan SLTA	ribu orang	1.184,3	1.216,2	1.242,3	1.299,0	1.368,5	1.523,3
a. SMU	ribu orang	698,4	675,7	699,5	723,7	755,2	838,4
b. SMK	ribu orang	364,9	412,2	407,6	433,3	464,9	530,5
c. MA	ribu orang	121,0	128,3	135,2	142,0	148,4	154,4
6. Murid menurut kelompok usia	ribu orang	4.108,5	4.247,5	4.384,6	4.667,6	5.033,5	5.452,4
a. <= 15 tahun	ribu orang	372,7	443,2	515,8	604,9	706,4	817,9
b. 16-18 tahun	ribu orang	3.052,8	3.172,4	3.278,2	3.493,4	3.771,2	4.089,3
c. >= 19 tahun	ribu orang	683,0	631,9	590,6	569,3	555,9	545,2
7. Angka partisipasi murni 3)	%	24,7	25,0	25,3	26,5	28,2	30,4
8. Angka partisipasi kasar 4)	%	33,2	33,4	33,8	35,4	37,7	40,5
a. SMU	%	18,9	18,7	18,9	19,6	20,8	22,3
b. SMK	%	11,0	11,4	11,5	12,2	13,3	14,5
c. MA	%	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
9. Angka melanjutkan ke SLTA	%	77,8	78,6	79,5	80,3	81,2	82,0

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)

2) Proyeksi Penduduk, BPS (1993)

3) Angka partisipasi murni (APM) = $\frac{\text{Jumlah murid SLTA (SMU+SMK+MA) berusia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun}} \times 100\%$

4) Angka partisipasi kasar (APK) = $\frac{\text{Jumlah murid SLTA (SMU+SMK+MA)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun}} \times 100\%$

TABEL 32-6
SASARAN MAHASISWA DAN TENAGA AKADEMIK PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU)
DAN PERGURUAN TINGGI AGAMA (PTA)
1994/95-1998/99

Jenis Sasaran	Satuan	Akhir Repelita V 1)	Repelita VI				
			1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
1. Penduduk usia 19 - 24 2)	ribu orang	21.597,0	22.156,9	22.750,7	23.390,9	24.051,6	24.704,3
2. Lulusan SLTA	ribu orang	1.184,3	1.216,2	1.242,3	1.299,0	1.368,5	1.523,3
3. Mahasiswa baru	ribu orang	485,6	507,0	554,0	613,2	661,0	752,6
Program diploma	ribu orang	125,6	132,5	150,3	170,2	191,5	225,5
a) Politeknik	ribu orang	7,1	10,9	14,9	19,5	24,6	30,5
b) Non politeknik	ribu orang	94,8	97,3	108,1	120,8	135,4	160,0
c) PTA (non politeknik)	ribu orang	23,7	24,3	27,3	29,9	31,5	35,0
Program sarjana	ribu orang	330,4	342,9	370,2	406,6	429,8	481,4
a) PTU	ribu orang	286,8	294,3	316,8	346,8	366,8	411,3
b) PTA	ribu orang	43,8	48,6	53,4	59,8	63,0	70,1
Program kedinasan	ribu orang	29,6	31,6	33,5	36,4	39,7	45,7
4. Jumlah mahasiswa	ribu orang	2.273,2	2.407,0	2.571,5	2.754,6	2.939,9	3.167,9
Program diploma	ribu orang	469,1	499,9	538,2	590,3	643,1	711,4
a) Politeknik	ribu orang	19,7	25,8	34,2	44,8	57,5	72,1
b) Non politeknik	ribu orang	385,6	402,1	430,0	462,5	500,3	551,7
c) PTA (non politeknik)	ribu orang	63,8	72,0	74,0	83,0	85,3	87,6
Program sarjana	ribu orang	1.689,6	1.787,6	1.908,5	2.032,9	2.157,5	2.305,7
a) PTU	ribu orang	1.537,4	1.615,9	1.732,2	1.835,2	1.954,2	2.096,8
b) PTA	ribu orang	152,1	171,7	176,3	197,7	203,3	208,8
Program kedinasan	ribu orang	114,5	119,5	124,8	131,4	139,3	150,8
5. Mahasiswa program pasca sarjana	ribu orang	8,0	9,7	10,8	11,7	13,0	15,2
6. Lulusan	ribu orang	217,6	249,9	284,1	325,0	371,4	421,6
Program diploma	ribu orang	50,6	61,6	73,6	87,8	104,1	122,8
a) Politeknik	ribu orang	3,3	4,1	5,7	7,9	10,8	14,4
b) Non politeknik	ribu orang	42,3	49,5	56,7	65,0	74,5	85,6
c) PTA (non politeknik)	ribu orang	5,0	8,0	11,2	14,9	18,8	22,8
Program sarjana	ribu orang	144,9	164,8	185,4	210,4	238,4	267,5
a) PTU	ribu orang	131,5	147,4	163,6	183,7	206,2	229,7
b) PTA	ribu orang	13,4	17,4	21,8	26,7	32,2	37,8
Program kedinasan	ribu orang	22,1	23,5	25,1	26,8	28,9	31,3
7. Lulusan pasca sarjana	ribu orang	2,0	2,3	2,6	3,0	3,4	3,9
8. Angka partisipasi kasar 3)	%	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,8
a. PTU	%	9,5	9,8	10,2	10,6	11,0	11,6
b. PTA	%	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
9. Angka melanjutkan ke PT	%	41,0	41,7	44,6	47,2	48,3	49,4

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)
2) Proyeksi Penduduk, BPS (1993)

3) Angka partisipasi kasar (APK) = $\frac{\text{Jumlah mahasiswa PT}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 19--24 tahun}} \times 100\%$

1998/99. Jumlah lulusan SD dan MI yang akan ditampung di SLTP dan MTs meningkat sebesar 540 ribu, yaitu dari 2,56 juta pada tahun 1993/94 menjadi 3,1 juta pada tahun 1998/99. Daya tampung SLTP dan MTs akan ditingkatkan menjadi 8,8 juta siswa sehingga jumlah murid SLTP dan MTs bertambah sekitar 1,8 juta selama Repelita VI.

Khusus untuk SLTP (tidak termasuk MTs) jumlah murid akan meningkat 26 persen atau sejumlah 1,5 juta siswa, yaitu dari 5,75 juta pada tahun 1993/94 menjadi 7,28 juta orang pada tahun 1998/99. Angka partisipasi kasar (APK) SLTP di luar MTs meningkat dari kurang lebih 43 persen menjadi sekitar 55 persen.

Jumlah lulusan SLTP dan MTs yang akan ditampung di SLTA dan MA ditingkatkan menjadi sekitar 550 ribu, yaitu dari 1,5 juta pada tahun 1993/94 menjadi sekitar 2 juta pada tahun 1998/99 sehingga jumlah murid SLTA termasuk MA meningkat sebanyak 1,4 juta siswa yaitu dari sekitar 4,1 juta pada tahun 1993/94 menjadi sekitar 5,5 juta pada tahun 1998/99.

Jumlah murid SMU negeri dan swasta diperkirakan akan bertambah sekitar 700 ribu orang yaitu dari 2,3 juta menjadi 3 juta orang sehingga APK SMU meningkat dari sekitar 19 persen menjadi lebih dari 22 persen. Sementara itu, jumlah murid SMK bertambah sekitar 600 ribu yaitu dari 1,4 juta menjadi 2 juta orang sehingga APK SMK meningkat dari sekitar 11,0 persen menjadi kurang lebih 14,5 persen.

Jumlah lulusan SLTA termasuk SMK dan MA yang tertampung di PT dan PTA akan meningkat sekitar 260 ribu, yaitu dari sekitar 490 ribu pada tahun 1993/94 menjadi 750 ribu pada tahun 1998/99 sehingga jumlah mahasiswa dalam Repelita VI meningkat sekitar 910 ribu orang, yaitu dari 2,27 juta orang menjadi 3,17 juta orang. Dengan demikian, APK tingkat PT termasuk pendidikan kedinasan dan PTA akan meningkat dari sekitar 10,5 persen pada tahun 1993/94 menjadi sekitar 13 persen

pada tahun 1998/99. Tambahan mahasiswa tersebut terdiri dari sekitar 242 ribu mahasiswa program diploma, 616 ribu mahasiswa program sarjana (non kedinasan), dan 36 ribu mahasiswa program kedinasan. Jumlah mahasiswa program pascasarjana meningkat dari 8 ribu orang pada tahun 1993/94 menjadi 15,2 ribu orang pada tahun 1998/99.

Sasaran program PLS selama Repelita VI adalah berkurangnya jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara menjadi sekitar 10 persen pada akhir Repelita VI. Untuk itu, program Paket A tidak setara SD direncanakan menjangkau sekitar 6 juta orang, Paket A setara SD sekitar 5 juta orang, dan Paket B sekitar 1,5 juta orang. Di samping itu, sasaran kelompok belajar usaha adalah sekitar 216 ribu kelompok dan magang sekitar 360 ribu orang. Pembinaan lembaga kursus diharapkan dapat melayani 19.500 lembaga.

Sasaran yang penting pula adalah meningkatnya jumlah guru SD yang berkualifikasi D-2, guru SLTP yang berkualifikasi D-3, dan guru SLTA yang berkualifikasi S-1.

3. Kebijakan

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional dalam Repelita VI sesuai arahan GBHN 1993, disusun serangkaian kebijakan meliputi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan menengah umum dan kejuruan; pembinaan pendidikan tinggi; pembinaan pendidikan luar sekolah; pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya; pengembangan kurikulum; pengembangan buku; pembinaan sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha; dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan.

a. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan dengan sebaik-baiknya agar terwujud pemerataan pendidikan dasar yang bermutu sampai menjangkau penduduk di daerah terpencil. Pelaksanaannya mulai pada tahun pertama Repelita VI dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam tiga repelita sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, dilakukan pembebasan SPP secara bertahap, penghapusan syarat masuk dari SD ke SLTP, dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi murid berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara itu, siswa yang berasal dari keluarga mampu didorong untuk ikut memikul pembiayaan pendidikan secara lebih proporsional.

Mutu pendidikan dasar ditingkatkan terutama melalui upaya pengembangan kurikulum dan metode belajar-mengajar, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Materi pelajaran yang dapat menumbuhkembangkan budaya iptek sejak dini dan mempertinggi ketahanan agama dan budaya dikembangkan secara berkesinambungan.

Agar siswa SLTP yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah mempunyai bekal kemampuan yang lebih baik untuk dapat terjun ke dunia kerja, kurikulum muatan lokal SLTP akan diperkaya dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pembangunan prasarana pendidikan terutama berupa gedung sekolah diarahkan agar dapat memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk tetap berkembang. Untuk itu, pembangunan gedung sekolah harus sesuai dengan peta pendidikan yang telah memperhitungkan ketepatan lokasi sesuai dengan perkembangan jumlah murid.

b. Pembinaan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

Kualitas sekolah menengah umum (SMU) ditingkatkan, antara lain dengan pengembangan kurikulum baru yang bercirikan penyelenggaraan pendidikan per catur wulan, penjurusan di kelas III, dan berisi komponen kurikulum muatan lokal, serta dilaksanakan di semua sekolah menengah umum di seluruh tanah air sehingga menjadi operasional di tingkat sekolah dan di tingkat kelas.

Guna memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan secara lebih efektif dan efisien, terutama di kota besar, dirintis dan diupayakan penyelenggaraan sekolah menengah umum dalam ukuran daya tampung yang besar antara 3 ribu hingga 5 ribu murid.

Penataan program studi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan iptek serta tuntutan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha . Untuk itu, pengembangan sistem permagangan di dunia usaha ditingkatkan dan diarahkan pada pembinaan dan pembentukan kemampuan dan sikap profesional. Selain itu, pembangunan pendidikan di setiap daerah diarahkan agar sesuai dengan kondisi setempat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang bersangkutan.

Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan dilakukan terutama dengan peningkatan dan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikan, perbaikan metode belajar-mengajar, pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan, serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Kerja sama kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha ditingkatkan, antara lain melalui pengembangan sistem

perdagangan. Dalam pada itu, dikembangkan mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

c. Pembinaan Pendidikan Tinggi

Perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi ditingkatkan dengan memperbesar daya tampung PT, baik negeri maupun swasta, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh. Penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta termasuk keteknikan, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk seni diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan perkembangan iptek, tuntutan kebutuhan pembangunan serta perkembangan zaman. Mutu program pascasarjana ditingkatkan antara lain dengan merintis penerimaan mahasiswa melalui ujian seleksi atau ujian penempatan.

Kegiatan penelitian di PT ditingkatkan untuk menunjang pendidikan dan pengembangan iptek serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Hasil penelitian disebarluaskan melalui penerbitan dan publikasi ilmiah, yang makin ditingkatkan pula mutu dan jangkauannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana pengembangan dan penyebarluasan iptek kepada masyarakat juga ditingkatkan sehingga kehadiran PT lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat semakin ditingkatkan dalam upaya meningkatkan mutu proses belajar-mengajar.

Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim yang mendukung terciptanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai lembaga keilmuan serta terciptanya tata kehidupan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis. Otonomi PT makin ditingkatkan agar PT berkembang menjadi lembaga yang mandiri.

Pembinaan dan pengembangan jiwa kepemimpinan mahasiswa ditingkatkan melalui penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler seperti pengembangan organisasi kemahasiswaan dan organisasi profesi, pembinaan keagamaan, kegiatan budaya dan kesenian, serta pembinaan olahraga. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih mengembangkan kreativitasnya sebagai calon pemimpin di masa depan yang mempunyai tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial serta disiplin nasional yang tinggi.

Perguruan tinggi didorong untuk membina dan mengembangkan program studi yang lebih sesuai dan dibutuhkan oleh daerah setempat dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi, akreditasi baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, dilakukan secara bertahap.

d. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Program pendidikan luar sekolah ditingkatkan dengan memperluas jenis dan jangkauan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung semakin beranekaragam dan diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha. Jangkauan dan kualitas program kelompok belajar Paket A dan Paket B bagi penduduk yang tidak mampu mengikuti pendidikan dasar di sekolah diperluas dan diarahkan untuk mendukung Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Program pendidikan luar sekolah sebagai upaya untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar) ditingkatkan dan diperluas jenis dan jangkauannya agar dapat menampung siswa putus sekolah

dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta anggota masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, program pendidikan luar sekolah diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa kursus pendidikan budaya dan kegemaran seperti keterampilan khusus, kebugaran, gizi, kesenian, dan bahasa dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang cenderung makin canggih dan beraneka ragam.

Sistem dan prosedur pembinaan belajar usaha dan magang bagi penduduk yang tidak sekolah sebagai salah satu bentuk pendidikan kewiraswastaan, disempurnakan dan diselenggarakan secara terpadu dengan berbagai program sejenis lainnya, seperti pembinaan pengusaha lemah, dan diarahkan untuk mendukung upaya mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Di samping itu, diupayakan pula agar pendidikan keluarga sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah dapat meningkatkan fungsinya untuk memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan kepribadian, penanaman nilai-nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan budi pekerti luhur.

e. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

Kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya ditingkatkan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan serta citra, wibawa, harkat dan martabat guru, antara lain melalui pendidikan, penataran dan penyegaran yang dilakukan sebagai proses yang berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, kesempatan dan beasiswa diberikan kepada tenaga kependidikan yang mampu dari segi akademik, berdedikasi dan berprestasi dalam tugasnya.

Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditingkatkan antara lain dengan pembinaan karier yang terencana dan penghargaan yang memadai bagi mereka yang bertugas di daerah perdesaan, perbatasan, dan terpencil. Selain itu, insentif dan penghargaan bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi dikembangkan untuk memacu prestasi. Dalam hal ini, peran masyarakat termasuk dunia usaha didorong dan ditingkatkan.

Untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga kependidikan antardaerah dilakukan penyempurnaan sistem pengadaan, pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, antara lain melalui pendataan yang dapat diandalkan dan koordinasi antar berbagai instansi terkait.

Sejalan dengan itu, untuk memperoleh tenaga kependidikan yang berkualitas dilakukan penataan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang meliputi penataan program studi, penyempurnaan kurikulum, penelusuran calon peserta didik, peningkatan mutu dosen, dan penyediaan sarana pendidikan seperti peralatan praktikum yang memadai sesuai dengan perkembangan iptek serta kurikulum sekolah tempat guru bertugas.

f. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dikembangkan dan diperkaya secara berkala sesuai dengan perkembangan iptek, perkembangan zaman dan tuntutan pembangunan. Selain itu, kurikulum diperkaya dengan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah setempat.

Dalam rangka membina keseimbangan antara kualitas daya nalar dengan kualitas rohaniah termasuk keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, rasa cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial, maka pendidikan agama,

pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan diberikan secara makin mantap dan makin efektif pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah. Dalam pada itu, terus diupayakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan di sekolah dan kampus perguruan tinggi.

Dalam rangka memasyarakatkan dan menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan budaya iptek sejak dini, diupayakan penyempurnaan metode belajar-mengajar dan pengembangan kurikulum secara dinamis. Sejalan dengan itu, budaya meneliti dan menulis dikembangkan melalui pengembangan iklim belajar yang mendukung dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah. Bagi peneliti dan penulis berprestasi yang mampu menghasilkan karya bermutu diupayakan untuk mendapat penghargaan yang dapat menjadi daya tarik bagi para penulis dan peneliti lainnya.

Selain itu, isi kurikulum dan metode belajar-mengajarnya dikembangkan pula agar lebih mampu menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek sejak usia dini. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dikembangkan secara serasi dan seimbang.

Kurikulum pada pendidikan prasekolah dan proses belajar-mengajarnya diarahkan pada pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sosialisasi awal, serta pembinaan keterampilan dan daya cipta peserta didik.

Pengajaran bahasa Indonesia dikembangkan dan disempurnakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan agar dapat memenuhi fungsinya sebagai bahasa komunikasi, bahasa profesional, dan bahasa iptek. Pelajaran bahasa daerah dikembangkan pula di daerah masing-masing sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan sebagai landasan pengembangan bahasa

Indonesia serta untuk mendukung upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemampuan penggunaan bahasa asing ditingkatkan pula untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan iptek serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat internasional.

Penyelenggaraan kurikulum dan metode belajar-mengajarnya diarahkan pula agar lebih mampu membina dan mengembangkan kepemimpinan peserta didik sejak dini dan lebih ditingkatkan lagi terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Kreativitas peserta didik dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti organisasi pramuka, profesi, keagamaan, budaya, kesenian, dan olahraga.

Pendidikan yang mengarah kepada pembudayaan sadar gizi dan hidup sehat, serta pengembangan kepemimpinan ditingkatkan pelaksanaannya di sekolah-sekolah antara lain melalui penyelenggaraan program ekstra kurikuler seperti usaha kesehatan sekolah, Palang Merah Remaja dan Pramuka. Kegiatan kepramukaan sebagai salah satu wahana untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan dan penanaman disiplin terus dibina dan dikembangkan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

g. Pengembangan Buku

Penulisan dan penerjemahan, serta penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, serta buku ilmiah lainnya yang bermutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca dan belajar peserta didik. Secara berkala dilakukan penilaian terhadap bahan ajaran yang diberikan sehingga terdapat kesinambungan bahan ajaran yang runtut terutama sejak tingkat dasar sampai tingkat menengah. Sementara itu, materi buku pelajaran terus dimantapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan dicegah penggantian buku pelajaran yang terlampau sering.

Penyediaan buku pelajaran bagi murid dengan rasio satu buku satu murid diutamakan bagi sekolah di daerah miskin atau tertinggal. Buku bacaan seperti buku cerita rakyat, ilmu pengetahuan alam populer dan ilmu pengetahuan lainnya diupayakan dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat dan disediakan pula di perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat untuk memasyarakatkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan budaya iptek. Pengadaan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat ditingkatkan hingga ke pelosok, terutama di daerah terpencil, dan terbelakang.

Kegiatan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan buku bacaan termasuk buku bacaan anak yang berisikan cerita rakyat dan buku iptek untuk mengembangkan budaya baca dan belajar dan memperluas cakrawala berpikir ditingkatkan antara lain dengan menyediakan penghargaan yang memadai kepada penulis berprestasi dan memberikan jaminan perlindungan hak cipta.

h. Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sehubungan dengan upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, kualitas serta efektivitas dan efisiensi pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ditingkatkan, baik jumlah maupun mutunya di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan.

Pembangunan prasarana pendidikan yang baru terutama gedung sekolah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang daerah, tepat lokasi, berwawasan lingkungan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan belajar-mengajar.

Sarana olahraga dan pendidikan jasmani diupayakan ketersediaannya di sekolah atau lokasi terdekat dari sekolah sehingga dapat digunakan untuk sarana pendidikan jasmani dan olahraga dan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu, sarana dan prasarana pendidikan yang

telah dibangun, dipelihara agar tidak cepat rusak, dan dirawat dengan baik untuk meningkatkan daya guna.

i. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Termasuk Dunia Usaha

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkatkan, antara lain, dengan mengembangkan mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan bagi peserta didik dan lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.

Hubungan yang lebih erat dan serasi antara sekolah dan keluarga peserta didik dan masyarakat dibina dan dikembangkan, terutama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kelompok masyarakat mampu didorong untuk memberikan sumbangan yang lebih besar dalam membiayai pendidikan. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mampu disediakan bantuan, baik langsung maupun tak langsung, demi pemerataan dan keadilan pendidikan.

Dunia usaha didorong untuk turut membantu penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan beasiswa kepada peserta didik berprestasi tetapi tak mampu, memberi bantuan tenaga, serta menyediakan fasilitas seperti untuk magang, kerja praktek dan penelitian. Masyarakat termasuk dunia usaha didorong pula untuk memberikan pemikiran dan pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan pendidikan sehingga kesesuaian antara kebutuhan dunia usaha dengan dunia pendidikan dapat lebih terjamin.

Perguruan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional ditingkatkan pembinaan dan pengawasannya agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Peningkatan Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas Pendidikan

Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan ditingkatkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk peningkatan kemampuan dan penyempurnaan perencanaan terpadu, administrasi pelayanan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengorganisasian, hubungan luar negeri, hukum, dan ketatausahaan. Penelitian dan pengembangan kebijaksanaan, pengelolaan dan penyajian informasi, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan dan pengujian ditingkatkan pula. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula sistem pengendalian dan pengawasan program pendidikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pokok

a. Program Pembinaan Pendidikan Dasar

Program pembinaan pendidikan dasar meliputi pembinaan pendidikan prasekolah, pembinaan SD, pembinaan SLTP, dan pembinaan sekolah luar biasa (SLB).

1) Pembinaan Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mentalnya. Lembaga pendidikan prasekolah di jalur pendidikan sekolah diwujudkan dalam satuan taman kanak-kanak (TK).

Peningkatan mutu pendidikan TK akan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan kependidikan guru, kepala sekolah, dan penilik; peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; penyempurnaan materi dan metode belajar-mengajar dalam pendidikan Pancasila dan pendidikan agama guna mengembangkan sikap dan kepribadian; pengadaan buku perpustakaan, alat peraga, dan alat bermain; serta lomba kreativitas guru dan anak didik. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan TK didorong dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan TK disertai dengan bimbingan dan pembinaan. Guna memenuhi kebutuhan guru, diupayakan pengadaan dan pengangkatan guru untuk TK negeri termasuk perbantuan guru negeri kepada TK swasta.

2) Pembinaan Sekolah Dasar

Pendidikan sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke SLTP.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan termasuk bagi penduduk di daerah terpencil. Sehubungan dengan itu, efisiensi penggunaan gedung SD akan ditingkatkan, antara lain, dengan memanfaatkan gedung yang kosong dan kekurangan murid untuk menampung murid SLTP dan MTs.

Pembangunan unit gedung baru (UGB) didahulukan untuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan yang sudah berkembang dan memerlukan, serta daerah permukiman baru termasuk daerah transmigrasi, sedangkan pembangunan tambahan ruang kelas baru (RKB) diutamakan bagi daerah padat penduduk. Kegiatan rehabilitasi gedung sekolah yang

rusak ditingkatkan dengan penyerahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Pelayanan pendidikan di daerah terpencil termasuk bagi masyarakat terasing ditingkatkan dan dikembangkan melalui pembangunan SD Kecil dengan penyediaan perangkat modul dan media pendidikan lainnya yang sesuai, serta pemberian insentif kepada guru sebagai daya tarik dan penghargaan.

Dalam rangka memantapkan kelangsungan pendidikan bagi murid yang kurang beruntung dan untuk menekan jumlah murid putus sekolah atau mengulang, diberikan bimbingan, penyuluhan, dan motivasi bagi siswa, orang tua, dan masyarakat. Siswa berbakat dan berprestasi tetapi tidak mampu, diupayakan untuk memperoleh beasiswa dan berbagai bantuan lainnya. Bagi murid yang memiliki kecerdasan luar biasa diadakan upaya khusus yang memungkinkan pengembangan potensi dan kemampuannya lebih baik. Di samping itu, dikembangkan program pemberian makanan tambahan di sekolah, terutama di daerah tertinggal yang rawan gizi dan kesehatan. Peran serta masyarakat termasuk dunia usaha didorong antara lain melalui program orang tua asuh dan penyediaan bantuan lainnya. Keterlibatan lembaga sosial termasuk lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan didorong dan dikembangkan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diupayakan tambahan sarana dan prasarana terutama bagi SD Inti seperti perpustakaan, ruang serba guna, ruang kelompok kerja guru (KKG), alat pendidikan IPA dan matematika, serta alat pendidikan jasmani dan kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan kurikulum dan metode belajar-mengajar yang diperlukan. Pembakuan dan pengadaan alat peraga dan media pendidikan dilakukan untuk meningkatkan minat dan peran siswa dalam proses belajar-mengajar sehingga tumbuh rasa percaya diri, sikap, dan perilaku yang inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sumber daya setempat sebagai sumber belajar ditingkatkan pemanfaatannya.

Pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan sebagai upaya menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, disiplin dan tanggung jawab sosial pada peserta didik ditingkatkan dan makin dimantapkan. Dalam pada itu, pendidikan tentang hidup sehat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pendidikan jasmani dan kesehatan. Upaya tersebut didukung dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, usaha kesehatan sekolah (UKS), serta lomba olahraga dan seni. Sehubungan dengan itu, diupayakan tersedianya sarana dan prasarana seperti tempat ibadat serta sarana olahraga dan kesehatan.

Kurikulum dan metode belajar-mengajar disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan jiwa dan daya nalar anak, dan diarahkan untuk menanamkan budaya belajar dan budaya iptek sejak dini. Pelaksanaan kurikulum sebagai bagian penting dari peningkatan mutu pendidikan, diupayakan peningkatannya melalui pematapan metode dan sistem penilaian hasil belajar serta pengembangan dan pemanfaatan media instruksional yang mendorong peserta didik berperan aktif dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar.

Dalam upaya mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik diupayakan tersedianya buku pelajaran pokok dengan rasio buku-murid yang ideal (1:1) yang diutamakan bagi sekolah di daerah miskin atau tertinggal. Di samping itu, disediakan buku bacaan dan buku pendidikan lainnya sebagai bagian dari perpustakaan sekolah. Kualitas buku-buku tersebut ditingkatkan, antara lain melalui penulisan dan sistem seleksi yang lebih baik. Dalam hal ini, peranan penerbit swasta dalam menyediakan buku bermutu didorong dan ditingkatkan. Berbagai kegiatan seperti lomba mengarang, kesenian, dan keterampilan bagi guru dan murid dilakukan untuk mengembangkan kegemaran membaca, belajar, dan berkarya.

Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dilakukan melalui penataran guru, kepala sekolah, penilik dan peningkatan kualifikasi guru sehingga setara dengan D-2. Di samping itu, kesejahteraan guru diupayakan untuk ditingkatkan, antara lain melalui penyempurnaan pelayanan administrasi termasuk pengembangan sistem angka kredit bagi jabatan guru. Kepada guru dan tenaga kependidikan SD lainnya yang berprestasi dan berdedikasi diupayakan pemberian insentif sebagai penghargaan serta guna merangsang motivasi untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengatasi kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan antardaerah dan antarsekolah dilakukan pemerataan sebaran guru yang telah ada di lapangan. Pengangkatan dan penempatan guru kelas, guru agama, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, serta guru pengganti yang pensiun serta tenaga kependidikan lainnya diupayakan agar lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pengelolaan SD serta peningkatan mutu pendidikan dilakukan penataran, pembinaan, dan pelatihan manajemen terutama bagi para kepala sekolah dan penilik. Selain itu, dikembangkan pula sistem dan alat ukur penilaian pendidikan untuk meningkatkan pengendalian dan mutu pendidikan.

3) Pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SD yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah.

Program utama pendidikan SLTP adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Untuk mendukung program

tersebut syarat masuk dari SD ke SLTP akan ditiadakan. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tampung disediakan secara bertahap, termasuk penambahan UGB dan RKB serta rehabilitasi gedung yang sudah ada. Khusus bagi daerah terpencil dan perbatasan diusahakan penyediaan rumah dinas kepala sekolah dan wisma guru. Pada tahap pertama pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diusahakan untuk memanfaatkan gedung sekolah yang telah ada termasuk gedung SD. Peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun didorong dan ditingkatkan termasuk membangun sekolah baru.

Bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu diupayakan penyediaan bantuan biaya pendidikan, antara lain beasiswa atau bantuan lain yang bersifat mendidik, dengan maksud agar anak yang kurang beruntung dapat menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SLTP. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai sebab tidak dapat mengikuti pendidikan di SLTP biasa diselenggarakan melalui SLTP Terbuka. Di daerah terpencil dengan penduduk usia SLTP yang terbatas diselenggarakan SLTP Kecil.

Bagi murid yang memiliki kecerdasan luar biasa diadakan upaya khusus yang memungkinkan pengembangan potensi dan kemampuannya secara lebih baik, antara lain dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan lebih awal melalui kenaikan kelas istimewa.

Dalam upaya memberikan bekal keterampilan kepada murid SLTP dikembangkan program keterampilan melalui pengisian kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan kokurikuler dengan berbagai pilihan paket keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat. Program keterampilan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi tenaga terampil dan produktif sebagai bekal memasuki dunia kerja di samping untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pembudayaan iptek dikembangkan sejalan dengan penyempurnaan metode belajar-mengajar yang didukung dengan pengadaan peralatan praktek IPA, IPS, matematika, dan keterampilan yang merangsang minat dan motivasi siswa untuk memahami materi pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat seperti kegiatan ilmiah dan belajar memahami fenomena alam, didorong dan dikembangkan. Pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam upaya membina keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral, budi pekerti, dan jiwa kepemimpinan, didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk tempat ibadat. Dalam upaya mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik, disediakan buku pelajaran pokok secara memadai serta buku bacaan dan buku pendidikan lainnya sebagai perpustakaan sekolah, yang disertai dengan penulisan dan sistem seleksi buku yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan berbagai penataran bagi sekitar 100 ribu orang. Khusus untuk peningkatan kualitas guru SLTP akan dilakukan pendidikan setara D-3. Di samping itu, kesejahteraan guru diupayakan untuk ditingkatkan, antara lain melalui penyempurnaan pelayanan administrasi termasuk pengembangan sistem angka kredit bagi jabatan guru. Kepada guru dan tenaga kependidikan SLTP lainnya yang berprestasi dan berdedikasi diupayakan pemberian insentif sebagai penghargaan serta guna merangsang motivasi untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengatasi kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan antardaerah dan antarsekolah dilakukan pemerataan sebaran guru yang telah ada di lapangan. Pengangkatan dan penempatan guru kelas, guru agama, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, serta guru pengganti yang pensiun serta tenaga kependidikan lainnya diupayakan agar lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan diupayakan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan termasuk alat peraga dan buku. Selain itu, diupayakan pula penataran, pembinaan, dan pelatihan manajemen terutama bagi para kepala sekolah dan penilik.

4) Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan bekerja atau untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan di SLB akan dikembangkan dan dibangun secara bertahap SLB pembina negeri tingkat propinsi, SLB pembina negeri tingkat kabupaten, penambahan ruang belajar serta rehabilitasi gedung yang rusak, untuk menampung pertambahan jumlah peserta didik sekitar 12,7 ribu orang, yaitu dari 38,3 ribu orang pada tahun 1993/94 menjadi 51 ribu orang pada tahun 1998/99.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidik bagi SLB tersebut akan diangkat guru serta tenaga teknis kependidikan luar biasa lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mencakup perbantuan guru negeri pada sejumlah SLB swasta. Di samping itu, akan dirintis cara pendidikan terpadu dan kelas khusus untuk peserta didik luar biasa.

Dalam upaya peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan luar biasa, dikembangkan kurikulum khusus bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda.

Mutu pendidikan SLB ditingkatkan melalui peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya serta pengadaan buku pelajaran, buku perpustakaan, buku pedoman guru dan buku siswa, seperti buku Braille dan *Talking Book*.

b. Program Pembinaan Pendidikan Menengah

1) Pembinaan Sekolah Menengah Umum

Program pembinaan sekolah menengah umum (SMU) ditekankan pada upaya menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, di samping menyediakan pilihan keterampilan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkannya lebih lanjut.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung diupayakan pembangunan UGB dengan berbagai tipe dan pembangunan RKB serta rehabilitasi gedung dan penggantian perabot yang rusak. Pembangunan UGB dan RKB disesuaikan dengan kebutuhan, tepat lokasi, dan menjamin keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar-mengajar.

Dalam rangka pemerataan pendidikan, terutama bagi peserta didik yang berprestasi tetapi tidak mampu, diupayakan pemberian beasiswa dan berbagai bantuan lainnya yang bersifat mendidik.

Pembinaan sikap dan kepribadian peserta didik dilakukan melalui penataran P4 bagi siswa baru. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral dan agama peserta didik dibina melalui peningkatan sistem belajar-mengajar dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk tempat ibadat sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan kesiswaan dilakukan melalui organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan. Pengembangan minat meneliti dalam rangka mengembangkan budaya iptek didorong melalui berbagai kegiatan ilmiah. Sejalan dengan itu,

diselenggarakan penataran dan penyegaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi guru, peningkatan wawasan kependidikan guru agama, peningkatan kemampuan guru olahraga dan kesehatan, dan guru pembina siswa.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, pengembangan kurikulum secara dinamis, pemantapan proses belajar-mengajar, penataan program studi, dan pengembangan media dan teknologi pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di samping itu, akan diupayakan pula buku dan peralatan praktek dalam jumlah, jenis, dan mutu yang memadai.

Dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan diupayakan pemantapan sistem manajemen sekolah.

2) Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah menengah kejuruan (SMK) mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional sehingga mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri sebagai tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini ataupun masa yang akan datang, serta menyiapkan lulusan agar menjadi warga negara yang tanggap dan mampu menyesuaikan diri, kreatif, inovatif, dan produktif.

Pembinaan sekolah menengah kejuruan diselaraskan dengan perkembangan iptek serta sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan daerah dan dunia usaha. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kelompok, seperti kelompok pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, pariwisata, serta kelompok seni dan kerajinan.

Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di SMK, diupayakan melalui peningkatan daya tampung SMK yang ada dalam bentuk penambahan RKB dan UGB sehingga dapat menampung tambahan sekitar 40 ribu murid, serta pemberian keringanan pembiayaan pendidikan bagi murid yang berprestasi, tetapi tidak mampu.

Sikap, kepribadian, serta keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa peserta didik dibina melalui penataran P4 bagi siswa baru dan pendidikan agama. Pembinaan kesiswaan ditingkatkan melalui jalur organisasi kesiswaan, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Di samping itu, minat dan budaya meneliti dalam rangka mengantisipasi kemajuan iptek diupayakan pengembangannya.

Dalam rangka meningkatkan mutu, diupayakan penyempurnaan materi pelajaran, penyusunan sistem ujian untuk mengukur kemahiran siswa melalui perintisan sistem uji profesi, pengadaan alat keterampilan dan alat praktek, dan pengisian kurikulum muatan lokal dengan kegiatan magang dalam keterampilan yang diperlukan melalui kerja sama kemitraan antara sekolah dengan industri dan dunia usaha lainnya. Selain itu, dikembangkan kerja sama yang lebih luas dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi terkait.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan dengan pengembangan sikap profesionalisme murid dan guru, serta peningkatan kemandirian sekolah melalui penataran guru dan tenaga kependidikan lainnya, pengembangan unit produksi, dan akreditasi sekolah, baik negeri maupun swasta.

c. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi

Program ini bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau

profesional, serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan iptek, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi peningkatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang didukung dengan sistem manajemen PT yang efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan daya tampung PT, dikembangkan penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh, serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik tinggi diupayakan pemberian beasiswa dan keringanan SPP. Pemberian beasiswa tersebut diupayakan pendanaannya selain dari Pemerintah juga terutama dari swasta. Di samping itu, mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu didorong untuk membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya secara lebih proporsional.

Dalam rangka peningkatan kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta perkembangan iptek dan tuntutan pembangunan, dilakukan berbagai upaya, antara lain penataan kurikulum agar lebih luwes dengan lebih mempertimbangkan muatan lokal; penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi antara ilmu dasar, ilmu eksakta termasuk keteknikan, ilmu sosial, dan humaniora termasuk seni; dan peningkatan kerja sama kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan pengguna lulusan lainnya.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi dilakukan dengan meningkatkan kualitas dosen melalui program pelatihan dan pendidikan lanjutan, penyempurnaan proses belajar-mengajar, dan penyediaan sarana praktek dan perpustakaan yang memadai. Selain itu, dilaksanakan akreditasi pendidikan tinggi secara bertahap.

Program pascasarjana ditingkatkan mutunya, antara lain melalui pengembangan sistem seleksi calon mahasiswa dengan menggunakan persyaratan yang baku.

Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat termasuk penyebarluasan teknologi tepat guna. Bagi dosen muda, dilakukan penataran untuk meningkatkan kemampuan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara lebih bermutu. Dalam pada itu, ditingkatkan pula kegiatan publikasi karya ilmiah melalui penerbitan jurnal atau majalah ilmiah yang makin ditingkatkan penyebarannya dan mutunya agar mencapai taraf internasional. Kuliah kerja nyata sebagai bagian dari kegiatan tridharma perguruan tinggi ditingkatkan dan dikembangkan, serta dikaitkan dengan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya penanaman keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, dan kesetiakawanan sosial dilakukan antara lain melalui penataran P4 bagi mahasiswa baru. Pendidikan agama dikembangkan dan disertai dengan penyediaan sarana ibadah dan fasilitas lain yang mendukung. Kegiatan kemahasiswaan ditingkatkan dan dikembangkan melalui organisasi kemahasiswaan dan organisasi profesi serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dalam bidang kesenian, kebudayaan, keolahragaan, dan keagamaan.

Dalam upaya mengembangkan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan kebudayaan, termasuk pengembangan budaya iptek. Selain itu, dikembangkan tata kehidupan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis dan demokratis yang mendukung terciptanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab.

Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan tinggi dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan metode belajar-mengajar guna menurunkan angka putus kuliah dan menghindari terlalu lamanya mahasiswa menyelesaikan studi. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan PT sebagai lembaga yang mandiri, otonomi PT semakin dikembangkan, antara lain melalui penyempurnaan sistem manajemen pendidikan tinggi.

d. Program Pendidikan Luar Sekolah

Program pendidikan luar sekolah yang berupa pendidikan masyarakat diarahkan pada usaha mendidik warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga peserta didik makin mampu mengembangkan potensi pribadi, memikul tugas dan tanggung jawab hidup bermasyarakat dan bernegara serta dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kelompok sasaran pendidikan masyarakat adalah warga masyarakat berusia sekitar 10-44 tahun yang putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur sekolah, dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya, termasuk mereka yang bergerak di sektor usaha informal.

Pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendidikan keluarga, pembinaan lembaga penitipan anak dan kelompok bermain, serta penyelenggaraan kelompok belajar Paket A setara dan tidak setara dengan SD, kelompok belajar Paket B setara dengan SLTP. Kelompok belajar Paket A dan Paket B diutamakan untuk memberantas tiga buta dan mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Di samping itu, dilakukan pula kegiatan pendidikan berkelanjutan melalui kelompok belajar usaha dan magang.

Untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, dilakukan pengangkatan dan pelatihan tenaga pendidikan masyarakat di berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan buku serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Di samping itu, ditingkatkan keterkaitan dan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan keterampilan berwiraswasta peserta didik guna meningkatkan taraf hidup. Di samping itu, dilaksanakan pula pembinaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kursus bagi masyarakat.

e. Program Pendidikan Kedinasan

Program pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diarahkan pada upaya pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, keahlian dan keterampilan, serta sikap mental yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui sekolah menengah dan PT kedinasan.

Dalam rangka peningkatan kesempatan belajar, pelaksanaan program pendidikan kedinasan antara lain dilakukan melalui perbaikan sistem penerimaan peserta didik, pemberian kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan studi, serta pengembangan metode belajar-mengajar. Peningkatan mutu pendidikan kedinasan antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pengadaan sumber belajar yang memadai. Peningkatan efisiensi antara lain dilakukan melalui pemantapan mekanisme pengelolaan dan peningkatan mutu pengelola pendidikan kedinasan.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan di semua sektor yang membutuhkan, seperti dalam bidang pangan dan gizi, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, kesejahteraan sosial, perindustrian, keuangan, perhubungan, administrasi pemerintah, dan pembangunan daerah.

f. Program Pembinaan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan mendukung upaya peningkatan pemerataan, mutu, kesesuaian, serta efisiensi dan efektivitas pendidikan yang mencakup perencanaan, pendidikan, penempatan, dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan.

Perencanaan tenaga kependidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan ditingkatkan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya di seluruh tanah air. Pengadaan dan penempatannya dilakukan terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Pendidikan tenaga kependidikan ditingkatkan mutunya antara lain melalui penelusuran minat dan kemampuan, pengembangan sistem seleksi, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kurikulum dan jenis pekerjaan di tempat lulusan bertugas, serta peningkatan kualitas dosen lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Selain itu, diupayakan pula penyediaan sarana dan prasarana ibadah untuk mendukung upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyediaan beasiswa akan diupayakan terutama bagi calon tenaga kependidikan yang akan bertugas di daerah terpencil.

Pembinaan tenaga kependidikan dikembangkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu akan dilakukan upaya peningkatan kualifikasi guru SD-MI hingga sekurang-kurangnya mencapai tingkat pendidikan D-2, guru SLTP-MTs sekurang-kurangnya berpendidikan D-3, dan SLTA-MA sekurang-kurangnya tingkat S-1. Peningkatan kualifikasi dosen dilakukan agar sekitar 50 persen dari seluruh tenaga dosen di PT sekurang-kurangnya berkualifikasi S-2 melalui pendidikan pascasarjana.

Pengembangan karier, kesejahteraan, dan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme, harkat dan martabat, serta kesejahteraan mereka sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan profesi, terutama dalam hubungannya dengan tugas guru sebagai pendidik yang mempersiapkan SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, diupayakan pengembangan sistem karier guru dan tenaga kependidikan lainnya sedemikian rupa sehingga mereka dapat meniti jenjang karier tersebut dengan jelas. Selain itu, dilakukan pula penyederhanaan sistem kenaikan pangkat dan jabatan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan jenjang karier yang dipilih, serta menghilangkan hambatan administrasi. Bagi tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi diupayakan penghargaan yang sepadan.

2. Program Penunjang

a. Program Pembinaan Anak dan Remaja

Pembinaan anak dan remaja bertujuan meningkatkan status gizi, membina perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur, menumbuhkan minat belajar, meningkatkan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, menumbuhkan kesadaran akan hidup sehat, serta menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat. Program ini meliputi pembinaan anak yang dimulai sejak dalam kandungan sampai remaja.

Dalam rangka pembinaan anak dan remaja dikembangkan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Pembinaan anak termasuk anak usia sekolah ditekankan pada peningkatan status gizi dan perilaku berbudi luhur, sedangkan pembinaan remaja, juga ditekankan pada peningkatan sikap mandiri, berprestasi,

bertanggung jawab, dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Bagi anak sekolah dasar di daerah miskin dan tertinggal akan diupayakan pemberian bantuan makanan tambahan yang bermutu gizi di sekolah.

b. Program Pembinaan Pemuda

Pembinaan dan pengembangan pemuda melalui sektor pendidikan pada hakikatnya bertujuan mewujudkan pemuda sebagai generasi pewaris cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai insan pembangunan yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang mandiri yang bersendikan Pancasila dan kepribadian bangsa yang diwujudkan dalam jati diri pemuda sebagai kader pembangunan bangsa dan sebagai pelopor dan penggerak pembangunan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir maju, beridealisme tinggi, patriotik, dan berwawasan masa depan.

Program ini antara lain meliputi perluasan kesempatan belajar berupa pelatihan kepemimpinan, perluasan wawasan generasi muda melalui pertukaran pemuda antarpropinsi dan antarnegara, pelatihan keterampilan, kegiatan kepramukaan, pembinaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan (SP3), dan pembinaan bagi organisasi kepemudaan. Sehubungan dengan itu, akan diupayakan peningkatan sarana dan prasarana berbagai pusat pembinaan pemuda, seperti Pusat Pembangunan Regional Pemuda/Pramuka Rajabasa Lama, Lampung.

c. Program Peranan Wanita

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria agar lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan dengan itu dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung serta kesempatan yang lebih luas bagi wanita untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dengan tetap memperhatikan kodrat,

harkat, dan martabatnya sebagai kaum wanita. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain adalah peningkatan kemampuan manajemen wanita dalam berbagai bidang, baik dalam sektor formal maupun informal, serta peningkatan kegiatan penelitian yang berwawasan *gender* yang dilakukan oleh pusat studi wanita di berbagai perguruan tinggi.

d. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program penelitian dan pengembangan pendidikan bertujuan untuk memperoleh masukan bagi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan pendidikan serta sarana dan prasarana penunjangnya. Program ini dilaksanakan antara lain melalui kegiatan penelitian dan/atau uji coba kurikulum baru, metode belajar mengajar baru, dan alat peraga baru serta sistem pembinaan tenaga kependidikan yang berdampak pada peningkatan mutu, kesesuaian, efisiensi, dan efektivitas pendidikan.

e. Program Pengembangan Informasi Pendidikan

Program ini bertujuan meningkatkan, mengembangkan, dan memantapkan sistem informasi pendidikan sehingga mampu memberikan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan guna proses pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta untuk memberikan data dan informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Kegiatan-kegiatannya antara lain (1) meningkatkan dan memantapkan organisasi dan tata kerja unit pengelola data dan informasi baik secara struktural maupun fungsional; (2) meningkatkan dan memantapkan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyimpanan data dan informasi; (3) meningkatkan dan memperluas otomatisasi sistem informasi pendidikan di pusat dan di daerah; (4) meningkatkan sumber daya tenaga pengelola data dan informasi; dan (5) meningkatkan pembinaan kelestarian sistem informasi.

f. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan agar dapat meningkatkan hasil kerja dalam menunjang pembangunan pendidikan. Program ini meliputi pendidikan, penataran dan berbagai bentuk dan jenis pelatihan tenaga teknis fungsional secara bertahap, pemantapan mekanisme pendidikan dan pelatihan, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pemantapan kelembagaan berbagai pusat pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan penyuluhan dimaksudkan untuk menyebarluaskan kebijaksanaan dan berbagai program dalam sektor pendidikan kepada masyarakat luas dan dunia swasta, seperti penyuluhan tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, tentang keterkaitan dan kesepadanan, permagangan dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media dan teknik penyuluhan sehingga partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan semakin meningkat.

C. OLAHRAGA

I. PENDAHULUAN

GBHN 1993 menunjukkan betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam PJP II bagi pembangunan nasional. Upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang diamanatkan GBHN tersebut ditempuh melalui pembangunan berbagai bidang, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang lainnya termasuk olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental, dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional.

Pembangunan olahraga ikut berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang dikumandangkan dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya: "...bangunlah jiwanya bangunlah badannya". Melalui olahraga yang dijadikan sebagai kebiasaan dan pola hidup akan terbentuk manusia dengan jasmani atau raga yang sehat dan bugar sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja.

Dimensi lain dari kegiatan olahraga adalah pencapaian prestasi tinggi dan gelar juara serta pemecahan rekor. Dalam rangka ini olahraga merupakan kegiatan nasional dan internasional yang penting. Prestasi olahraga merupakan pencerminan prestasi bangsa. Sebelum sampai pada prestasi harus dilalui tahap pendidikan yang mendasar karena prestasi hanya dapat dicapai melalui latihan yang teratur dan berkesinambungan yang memerlukan tekad baja, ketekunan dan sportivitas yang tinggi. Selain untuk meraih prestasi, kegiatan olahraga juga berkembang dalam bentuk olahraga rekreasi dengan penekanan pada pemeliharaan kesehatan dan kesegaran jasmani serta pembinaan mental.

Pembangunan olahraga dilaksanakan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air dan disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya bangsa Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia melalui olahraga diharapkan mampu menciptakan manusia Indonesia yang produktif, memiliki semangat dan daya juang serta daya saing yang tinggi. Melalui prestasi olahraga sebagai pencerminan prestasi bangsa, nama bangsa dan negara menjadi harum di dunia sehingga meningkat pula martabat bangsa.

Pemerataan pendidikan diutamakan pada jenjang pendidikan dasar yang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) akan ditingkatkan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Perhatian yang lebih besar akan diberikan kepada masyarakat yang bermukim di daerah terpencil dan penduduk yang kurang mampu. Aspek lain dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu, kesesuaian antara pendidikan dengan dunia kerja, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan yang semuanya diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam menghadapi PJP II.

Sejalan dengan pembangunan pendidikan, pembangunan olahraga yang juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditingkatkan dengan menitikberatkan pada pemasalan olahraga ke seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terselenggaranya pembangunan olahraga secara lebih mantap.

B. PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), dinyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan

BAB 32

PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

A. UMUM

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dan olahraga yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting. Melalui pembangunan pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani. Pembangunan olahraga dapat mendukung upaya pembentukan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Pembangunan pendidikan dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sudah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan akan terus ditingkatkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta secara terpadu.

Kegiatan olahraga telah berkembang dan mencakup pula olahraga bagi penyandang cacat yang dibina oleh Yayasan Pembinaan Olahraga Cacat (YPOC) yang kini menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), olahraga tradisional, pencinta alam, kebaharian dan perairan, serta kedirgantaraan.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan olahraga selama PJP I telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain ditandai dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan prestasi pada beberapa cabang olahraga. Dalam PJP II pembangunan olahraga diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu perlu dikenali secara dini berbagai tantangan tersebut serta kendala yang dapat menghambat di samping peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Pemasalan olahraga berfungsi menumbuhkan kesehatan dan kesegaran jasmani manusia Indonesia dalam rangka membangun manusia yang berkualitas dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pemasalan olahraga dapat pula berfungsi sebagai wahana dalam penelusuran bibit untuk membentuk olahragawan berprestasi. Dengan demikian, tantangan dalam pembangunan olahraga adalah meningkatkan dan memperluas pemasalan olahraga atau pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam upaya membangun kesehatan dan kesegaran jasmani, mental, dan rohani masyarakat serta membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Pencapaian prestasi yang tinggi di tingkat regional dan internasional membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Di kawasan Asia Tenggara, prestasi olahraga Indonesia termasuk menonjol dengan tampilnya Indonesia sebagai juara umum dalam beberapa kali *SEA Games*. Namun, di tingkat Asia, terlebih lagi di tingkat internasional prestasi olahraga Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lain, kecuali untuk beberapa cabang olahraga seperti bulu tangkis. Prestasi olahraga yang masih tergolong rendah di tingkat internasional tersebut tidak sesuai dengan potensi yang ada, yaitu jumlah penduduk yang besar, dan minat terhadap olahraga yang juga besar. Dalam kaitan itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan olahraga adalah meningkatkan prestasi olahraga di tingkat internasional dan mempertahankan prestasi olahraga yang telah dicapai.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga telah cukup berkembang, bahkan mempunyai andil dalam pencapaian prestasi di tingkat internasional pada beberapa cabang olahraga. Namun, keterlibatan itu masih terbatas dan belum melibatkan dunia usaha secara keseluruhan sehingga masih luas potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, menjadi tantangan dalam PJP II untuk membangkitkan swadana dan keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat pengusaha, untuk turut serta dalam pembangunan olahraga dalam rangka olahraga prestasi.

Olahraga telah berkembang hampir di seluruh tanah air, tetapi masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat perdesaan, masyarakat miskin, dan mereka yang tinggal di daerah terbelakang dan terpencil. Dalam kaitan itu, tantangan yang dihadapi adalah pemerataan olahraga sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Kendala

Lemahnya kedudukan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta kurangnya tenaga guru keolahragaan di lembaga pendidikan, baik jumlah maupun mutunya, merupakan kendala dalam menjawab berbagai tantangan di atas. Demikian pula, kurangnya sarana dan prasarana olahraga dari segi jumlah, jenis, penyebaran, dan mutunya, baik di sekolah, perguruan tinggi, lingkungan kerja, maupun lingkungan permukiman merupakan kendala. Akibatnya, penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah lebih banyak pada materi teori dan kurang disertai dengan praktek. Begitu pula, dukungan dari pengelola lembaga pendidikan kepada olahragawan berprestasi yang menjadi siswa/mahasiswa lembaga pendidikan tersebut untuk meninggalkan kelas guna keperluan berlatih atau bertanding masih dirasakan kurang.

Tempat berolahraga di lingkungan lembaga pendidikan, lingkungan permukiman, dan lingkungan industri di kota besar makin terbatas. Demikian pula, kurangnya tenaga keolahragaan profesional yang mengabdikan diri sepenuhnya pada pembangunan olahraga, seperti penggerak, pembina, dan pelatih, merupakan kendala pula dalam pembangunan olahraga.

Dalam upaya pemasyarakatan olahraga di tingkat desa, di lingkungan masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil, kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya tenaga penggerak olahraga di samping kelangkaan sarana dan prasarana olahraga.

Kendala yang lain adalah belum mantapnya koordinasi serta belum berkembangnya sistem pembinaan keolahragaan nasional yang membatasi berkembangnya prestasi olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

3. Peluang

Pemasalan olahraga melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang telah meluas dan tersebar ke seluruh pelosok tanah air, yang didukung oleh peningkatan kesejahteraan ekonomi, kesadaran dan minat masyarakat merupakan peluang bagi pembangunan olahraga pada PJP II.

Prestasi olahraga yang telah dicapai memberi peluang untuk memacu dan mendorong prestasi yang lebih tinggi lagi. Demikian pula, jumlah penduduk yang besar merupakan sumber untuk memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga. Tersedianya sarana alami berupa wilayah darat, perairan, dan udara Indonesia, memungkinkan pengembangan berbagai cabang olahraga. Sementara itu, banyaknya olahraga tradisional di masyarakat merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat dikembangkan, seperti olahraga bela diri dan olahraga perairan.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental, dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh pelosok tanah air untuk menciptakan budaya berolahraga

dan iklim yang sehat yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga. Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan keolahragaan.

Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi keolahragaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan, dan penggunaan peralatan olahraga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Perlu pula ditingkatkan penanaman nilai budaya yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan sikap pantang menyerah serta bertanggung jawab dalam mengejar keunggulan olahraga untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan bangsa dan negara.

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan permukiman yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun peran serta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata di seluruh pelosok tanah air serta mencakup segenap kelompok umur, baik pria maupun wanita meliputi anak, remaja, pemuda, penduduk usia lanjut, dan penyandang cacat. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatih olahraga serta penyelenggaraan latihan dan sistem pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.

Olahragawan, pelatih, dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi. Khusus bagi olahragawan yang berprestasi, perlu ada penanganan yang mendasar dan melembaga, terutama untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan olahraga dalam PJP II dititikberatkan pada pembudayaan olahraga dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan peningkatan prestasi olahraga nasional pada Olimpiade dan *Asian Games*. Peran serta dunia usaha makin besar dalam penyelenggaraan dan pendanaan kejuaraan nasional, regional, dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), *SEA Games*, *Asian Games*, dan Olimpiade.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan olahraga dalam Repelita VI adalah meningkatnya pemasalan olahraga secara luas dan merata ke seluruh pelosok tanah air dan mencakup seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya peringkat pada *Asian Games* dan dipertahankannya juara umum pada *SEA Games*; meningkatnya perolehan medali emas pada Olimpiade; dan terciptanya sistem pembinaan olahraga yang mendukung peningkatan prestasi.

3. Kebijaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan olahraga dalam Repelita VI sesuai dengan arahan GBHN 1993, disusun serangkaian kebijaksanaan meliputi pemasalan olahraga; pembinaan olahraga prestasi; pembinaan tenaga keolahragaan dan peningkatan peran

serta masyarakat; serta pembinaan kelembagaan dan organisasi induk olahraga.

a. Pemasalan Olahraga

Pemasalan olahraga diarahkan pada upaya untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan dan pola hidup masyarakat sehingga dapat mendukung pembentukan manusia yang sehat fisik, mental, dan rohani. Pemasalan olahraga ditingkatkan secara merata di seluruh tanah air dengan disertai penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai.

b. Pembinaan Olahraga Prestasi

Pembinaan olahraga prestasi diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.

Upaya pencapaian prestasi olahraga ditingkatkan melalui pembibitan dan pembinaan olahraga sejak dini, antara lain melalui pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan melalui pengembangan sekolah khusus keolahragaan. Upaya tersebut ditunjang oleh pengembangan kurikulum yang diperkaya dengan materi penanaman nilai budaya, untuk meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan sikap pantang menyerah.

Pemantauan bakat dan pemilihan bibit olahragawan yang berpotensi ditingkatkan, antara lain melalui berbagai pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antarsekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat luas.

Pembinaan olahraga prestasi dikembangkan sesuai dengan kemajuan iptek di bidang olahraga seperti penggunaan peralatan olahraga dan metode pembinaan dan pelatihan yang mutakhir.

Selain itu, ditingkatkan pula keadaan gizi olahragawan dan dikembangkan pola hidup olahragawan yang sesuai bagi peningkatan prestasi.

Peningkatan olahraga prestasi didukung pula dengan pengembangan sistem manajemen keolahragaan. Dalam kaitan ini, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada setiap instansi, baik pusat maupun daerah ditingkatkan dan diintensifkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

c. Pembinaan Tenaga Keolahragaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Mutu dan jumlah tenaga keolahragaan ditingkatkan, antara lain melalui penataran, pendidikan dan pelatihan, serta melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan yang wajar bagi tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Penanganan yang mendasar dan melembaga bagi olahragawan yang berprestasi diupayakan dan ditingkatkan, terutama untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.

Bagi para olahragawan yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional diberikan penghargaan, antara lain kemudahan mengikuti pendidikan sampai tingkat tertinggi, serta kemudahan memperoleh pekerjaan. Bagi para olahragawan pelajar dan mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional diberikan beasiswa, yang diupayakan pendanaannya, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, terutama dunia usaha. Demikian pula, bagi para pelatih yang berprestasi diberi penghargaan yang sepadan untuk lebih memacu prestasi.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, di samping pembibitan dan peningkatan prestasi para atlet, ditingkatkan pula pengetahuan, profesionalisme, dan mutu para pelatih, wasit, dan juri serta tenaga keolahragaan lainnya. Dalam rangka itu, lembaga pendidikan

keolahragaan makin ditingkatkan pembinaannya sehingga meningkatkan pula mutu dan jangkauannya.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan olahraga, termasuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga, baik pada pemasalan olahraga maupun pengembangan olahraga prestasi, didorong dan ditingkatkan, antara lain melalui pembinaan organisasi keolahragaan yang tumbuh di masyarakat dan pengembangan iklim yang mendukung.

d. Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Induk Olahraga

Fungsi kelembagaan dan mekanisme kerja yang sudah ada dimantapkan melalui peningkatan koordinasi kerja sektoral baik di pusat maupun di daerah.

Sejalan dengan itu, organisasi induk olahraga yang ada baik di pusat maupun di daerah dibina, dikembangkan dan ditingkatkan.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pokok

Program pokok dalam pembangunan keolahragaan adalah Program Pembinaan Keolahragaan yang mencakup kegiatan-kegiatan (a) pemasalan olahraga dan peningkatan kesegaran jasmani; (b) pemantauan bakat dan pembibitan; (c) peningkatan prestasi olahraga; (d) pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat; (e) pembinaan olahraga untuk kelompok khusus; dan (f) pembinaan kelembagaan dan organisasi induk olahraga.

a. Pemasalan Olahraga dan Peningkatan Kesegaran Jasmani

Pemasalan olahraga bertujuan mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, khususnya jenis olahraga yang bersifat mudah, murah, menarik, bermanfaat, dan masal.

Peningkatan kesegaran jasmani merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas fisik manusia Indonesia, termasuk mendukung peningkatan prestasi belajar, prestasi olahraga, dan produktivitas kerja.

Dalam rangka itu, diupayakan penyediaan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat untuk melakukan olahraga, dengan didukung oleh proses pemahaman, kesadaran, serta penghayatan arti, fungsi, nilai, dan manfaat olahraga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan prestasi olahraga.

Kegiatan pemasalan olahraga dan pembinaan kesegaran jasmani mencakup pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dengan mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha serta perkumpulan keolahragaan dan lembaga kemasyarakatan.

Peningkatan pendidikan jasmani dilakukan melalui penataan kembali kurikulum di semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam kaitan ini, materi dan sistem penilaian mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga disempurnakan secara berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah disediakan secara bertahap. Sehubungan dengan itu, disiapkan pedoman standardisasi kesegaran jasmani dan rekreasi,

buku pendidikan jasmani dan olahraga, dan sarana lainnya untuk menyebarkan informasi tentang keolahragaan.

Selain itu, dilakukan pula penelitian dan pengembangan kebugaran jasmani; penyusunan pola, pedoman, dan norma kebugaran jasmani; bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat kebugaran jasmani; pengembangan ketenagaan dalam bidang kebugaran jasmani; dan penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

b. Pemantauan Bakat dan Pembibitan

Kegiatan ini bertujuan memperoleh calon atlet yang berprestasi yang dilakukan melalui pembinaan olahraga usia dini bagi anak berumur 7-14 tahun melalui perkumpulan olahraga; pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah ataupun di luar sekolah melalui pertandingan cabang olahraga tertentu untuk mencari bibit olahragawan yang berpotensi; peningkatan mutu guru pendidikan jasmani dan kesehatan untuk membina, memantau, dan menemukan bibit olahragawan yang berbakat, baik di perkumpulan maupun di sekolah.

c. Peningkatan Prestasi Olahraga

Kegiatan ini bertujuan mendukung pencapaian dan peningkatan prestasi olahraga yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang mendukung.

Kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa pembinaan dan peningkatan prestasi bagi atlet pelajar dan mahasiswa berbakat pada pusat pendidikan dan pelatihan olahraga; pertandingan olahraga, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional; pembinaan olahraga prestasi bagi pelajar dan mahasiswa; pembinaan dan peningkatan prestasi bagi atlet daerah dan nasional; peningkatan mutu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan seperti pelatih, wasit, manajer,

dan jurnalis olahraga melalui berbagai penataran, pendidikan, dan pelatihan; peningkatan keadaan gizi olahragawan, antara lain dengan memberikan pengetahuan gizi, dan menetapkan standar persyaratan gizi bagi penyelenggaraan makanan olahragawan di pusat pelatihan dan asrama olahragawan; pemberian insentif yang wajar kepada atlet dan tenaga keolahragaan yang berprestasi tinggi; dan pembinaan melalui KONI, antara lain untuk pemantapan pembinaan administrasi, pembinaan hubungan kerja sama internasional dan pusat ilmu olahraga.

d. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan jenis olahraga yang berkembang di masyarakat, seperti olahraga tradisional dan olahraga pencinta alam dan alam terbuka.

Bentuk kegiatannya adalah pembinaan dan pengembangan serta pelestarian olahraga tradisional; pembinaan dan pengembangan olahraga pencinta alam dan alam terbuka; dan peningkatan prestasi dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

e. Pembinaan Olahraga untuk Kelompok Khusus

Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada kelompok khusus masyarakat seperti penyandang cacat dan penduduk usia lanjut untuk berolahraga dan ikut berperan, serta berprestasi pada kejuaraan olahraga khusus untuk mereka, baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Bentuk kegiatannya adalah pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat, dan olahraga khusus penduduk lanjut usia.

f. Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Induk Olahraga

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan fungsi kelembagaan, serta mekanisme kerja yang sudah ada disertai dengan peningkatan koordinasi kerja sektoral baik di pusat maupun di daerah.

Sejalan dengan itu organisasi induk olahraga baik di pusat maupun di daerah dikembangkan dan ditingkatkan sehingga peranannya makin berarti dan nyata dalam pembangunan olahraga.

2. Program Penunjang

a. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Olahraga

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, baik dari aspek keilmuan maupun keterampilan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan meliputi penataran atau pelatihan jangka pendek, termasuk magang untuk penggerak dan pelatih olahraga termasuk guru olahraga di sekolah dan perguruan tinggi; dan pembentukan pelatih dan manajer olahraga yang profesional melalui pendidikan olahraga tingkat pendidikan tinggi. Kegiatan penyuluhan olahraga dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga sehingga olahraga menjadi bagian dari kebiasaan hidup masyarakat.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan mengupayakan penyediaan, pengadaan, dan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Kegiatannya meliputi penyediaan dan pembangunan prasarana olahraga di sekolah, perguruan tinggi dan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga serta tempat lainnya, dengan mendorong peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

c. Program Penelitian dan Pengembangan Olahraga

Program ini bertujuan mengembangkan, memanfaatkan, dan menerapkan iptek di bidang olahraga, terutama dalam upaya mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya.

Kegiatan yang dilakukan, antara lain melanjutkan penelitian kebugaran jasmani di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat termasuk pekerja yang mengarah pada pembentukan pola baku sebagai pedoman untuk meningkatkan kebugaran jasmani; penelitian tentang gizi yang optimal bagi atlet dan olahragawan sesuai dengan cabang olahraga; serta penelitian mengenai jenis olahraga dan perlengkapannya yang sesuai dengan bentuk dan sifat fisik tubuh orang Indonesia.

D. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA VI

Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-program tersebut, yang merupakan program dalam bidang pendidikan dan olah raga, yang akan dibiayai dengan anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95 - 1998/99) adalah sebesar Rp19.893.540,0 juta. Rencana anggaran pembangunan pendidikan dan olah raga untuk tahun pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, sub sektor dan program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel 32-7.

Tabel 32-7

**RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 1994/95 dan Repelita VI (1994/95 - 1998/99)**

(dalam juta rupiah)

No. Kode	Sektor/Sub Sektor/Program	1994/95	1994/95 - 1998/99
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KE- PERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
11.1	<u>Sub Sektor Pendidikan</u>		
11.1.01	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	1.345.931,0	9.242.280,0
11.1.02	Program Pembinaan Pendidikan Menengah	568.560,0	3.687.310,0
11.1.03	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi	579.400,0	3.610.650,0
11.1.04	Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan	84.480,0	551.750,0
11.1.05	Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan	204.960,0	1.465.270,0
11.2	<u>Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan</u>		
11.2.01	Program Pendidikan Luar Sekolah	67.710,0	467.160,0
11.2.02	Program Pendidikan Kedinasan	127.121,0	793.900,0
11.4	<u>Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga</u>		
11.4.02	Program Pembinaan Keolahragaan	10.000,0	75.220,0

BAB 33

KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BAB 33

KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA'ESA

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagai perwujudan pembangunan berwawasan nusantara, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan

latar belakang berbagai bahasa dan kebudayaan daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, diamanatkan pula bahwa budaya bangsa pada hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa serta bercirikan kebhinnekaan dan keekaan bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh GBHN 1993, dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhinneka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah. Kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju ke arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kebudayaan bangsa dapat diartikan sebagai totalitas nilai dan perilaku yang mencerminkan hasrat dan kehendak masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hasrat dan kehendak masyarakat tersebut diejawantahkan dalam wujud pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman.

Selanjutnya GBHN 1993 juga mengamanatkan agar dalam PJP II pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi wahana komunikasi sosial dan wahana ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta seni dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menetapkan kepribadian bangsa.

GBHN 1993 juga memberikan petunjuk agar dalam PJP II pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan. Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan pemyarakatan nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, didukung oleh perluasan sarana dan prasarana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

GBHN 1993 menggariskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya. Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif, untuk memperkaya budaya nasional.

Di samping itu, GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa dalam Repelita VI, pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar- dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana kehidupan yang harmonis dan selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, antara lain diciptakan melalui pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa menciptakan landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, meningkatkan kerukunan antar umat agamanya dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antarpenganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN 1993 mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi pelestarian dan fungsi pengembangan budaya bangsa. Kedua fungsi pokok tersebut saling berkaitan dan saling memperkaya satu sama lain. Fungsi pelestarian dilakukan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam kesenian, tradisi, bahasa dan sastra, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Semuanya itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai harganya sehingga dapat

menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta sekaligus memberikan warna jati diri dan kepribadian bangsa. Fungsi pelestarian mempunyai arti memelihara, membina, dan mengembangkan nilai-nilai positif dan mengikis nilai-nilai negatif dengan menggunakan Pancasila sebagai acuan. Dalam fungsi pengembangan, nilai-nilai baru yang tidak bertentangan dengan Pancasila diterima guna memperkaya budaya bangsa dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya menulis, membaca, belajar, dan bersaing sehat yang diperkaya antara lain dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesetiakawanan sosial, dan rasa kebersamaan, taat asas, serta kedisiplinan merupakan suatu bentuk ramuan dari pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dalam rangka menuju kualitas bangsa yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia yang mampu menjawab tantangan gerak pembangunan.

Pembangunan kebudayaan dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan pada pengarah-pengarah GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

II. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PJP I

Dalam PJP I pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan dan mengembangkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin. Hal itu tercermin dalam kerukunan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin berkembangnya kebudayaan nasional yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, di samping melembaganya budaya dan semangat membangun di kalangan masyarakat, serta mantapnya semangat kebangsaan yang berwawasan Nusantara.

Pengungkapan dan penanaman nilai-nilai budaya telah dilaksanakan dengan berpegang pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di seluruh Indonesia melalui jalur sekolah dan luar sekolah, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi dan lembaga kebudayaan. Sejalan dengan itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan inventarisasi, perekaman, penelitian, pengkajian dan penganalisisan, serta pengembangan kebudayaan daerah, termasuk penelitian dan pengkajian isi naskah-naskah kuno demi mantapnya kebudayaan nasional.

Hasil penelitian dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan telah mendukung makin mantapnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional serta komunikasi resmi. Sementara itu, pembinaan bahasa daerah telah dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dalam rangka pembinaan bahasa telah dilakukan pembakuan ejaan, penyusunan tata bahasa baku, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berbagai kamus bahasa daerah, dan berbagai kamus istilah dan glosarium.

Guna mendorong minat baca dan minat belajar anggota masyarakat, telah dikembangkan perpustakaan daerah di seluruh propinsi dan disediakan sekitar 1,87 juta eksemplar buku bacaan. Selain itu, jangkauan layanan perpustakaan telah sampai ke perdesaan dengan mengoperasikan mobil unit perpustakaan keliling.

Dalam PJP I kreativitas dan daya cipta para seniman makin meningkat dengan didukung oleh peningkatan fasilitas Taman Budaya di 27 propinsi sehingga berbagai kegiatan kesenian baik tradisional maupun kontemporer makin berkembang. Sementara itu, minat dan apresiasi seni masyarakat semakin meningkat sehingga memperkuat ketahanan budaya masyarakat dalam menyaring pengaruh kebudayaan asing yang masuk. Berbagai kegiatan seni dan pertukaran seni yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama kebudayaan dengan berbagai negara, terutama

dengan negara-negara ASEAN telah menunjang program diplomasi bermatra kebudayaan, pengembangan pariwisata, dan program pendidikan.

Kegiatan pengungkapan dan pengkajian nilai-nilai tradisi kesejarahan, penulisan biografi pahlawan dan tokoh nasional, serta penyusunan buku sejarah di 27 propinsi selama PJP I telah menunjang pengembangan kesadaran sejarah dan semangat perjuangan bangsa serta mempertebal jati diri bangsa. Berbagai peninggalan sejarah dan purbakala telah dipelihara dan disimpan di setiap museum daerah serta dimanfaatkan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan nasional, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Berbagai bukti benda peninggalan sejarah dan purbakala telah dipelihara dan dipugar, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Sewu, Sambisari, Tikus, Bajangratu, Jawi, Benteng Vredeburg, Benteng La Galigo, Masjid Demak, Gereja Tugu, Makam Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Kraton Surakarta, Kraton Mangkunegaran, Kraton Yogyakarta, Kasepuhan dan Kanoman, Situs Muara Jambi, serta beberapa situs lainnya yang bernilai sejarah dan purbakala. Selain itu, telah ditemukan beberapa situs baru yang telah membuka dan memperkaya cakrawala dan wawasan keagungan budaya bangsa.

Dalam upaya memperkukuh landasan perlindungan dan pemeliharaan kebudayaan bangsa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Berkenaan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam PJP I telah terdaftar dan terbina berbagai aliran jenis dan jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selama PJP I telah berjalan dengan hasil yang baik. Dalam PJP II mendatang upaya itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka itu pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa akan menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu dikenali berbagai tantangan, kendala, dan peluang yang ada.

1. Tantangan

Di balik berbagai keberhasilan tersebut di atas, pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan dalam perkembangan dan tuntutan pembangunan dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI. Berbagai kecenderungan masa depan serta masalah yang akan timbul seiring dengan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara nasional, regional maupun global, membangkitkan tantangan yang harus dijawab dalam pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sejak Repelita IV dunia dilanda oleh gejolak yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan dan masih akan berlangsung dalam PJP II mendatang. Interaksi antarbangsa yang didorong oleh pesatnya kemajuan iptek, terutama teknologi komunikasi dan transportasi, mengakibatkan derasnya arus informasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing dari luar negeri yang tidak selalu sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya melalui siaran televisi dari luar, film, dan bahan bacaan serta media lain merupakan ancaman bagi pembangunan budaya nasional. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada

gilirannya dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya krisis jati diri dan kepribadian bangsa. Di pihak lain, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai daya tangkal yang andal dan kemampuan untuk memilih dan memilah berbagai pengaruh dari luar sehingga dampak negatif globalisasi senantiasa dapat dihindari. Dalam kaitan itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah perlu nya memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mempunyai ketahanan sosial budaya yang tangguh dan andal.

Sementara itu, proses pembangunan belum sepenuhnya mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap feodal dan eksklusif, serta individualistik. Derasnya urbanisasi yang mengakibatkan padatnya penduduk di perkotaan, antara lain menumbuhkan gejala persaingan yang tidak sehat dan budaya negatif lainnya yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan antaranggota dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan norma-norma agama dan nilai luhur budaya bangsa yang menjunjung tinggi gotong-royong, kebersamaan, serta silih asah, silih asuh, dan silih asih. Sementara itu, pembauran sebagai proses pembudayaan bangsa belum sepenuhnya terwujud secara positif dan dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah meningkatkan dan memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat utama menjalankan pembangunan.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan budaya bangsa adalah masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap kekayaan dan keluhuran nilai seni budaya bangsa, terutama seni tradisional. Dewasa ini bahkan terdapat kecenderungan makin deras nya arus masuk seni budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa ke dalam masyarakat. Selain itu,

penghargaan terhadap karya cipta seni dan seniman yang mendorong semangat untuk mengembangkan kreativitas seni masih belum merata. Hal itu menyebabkan pula terbatasnya karya seni yang bermutu termasuk karya sastra besar yang dilahirkan. Dalam pembinaan kesenian ini tantangan lain yang dihadapi adalah menciptakan iklim yang mendorong seluruh masyarakat agar lebih menghargai seni budaya bangsa dan menjaga kelestariannya serta mendorong lahirnya karya seni baru yang bermutu.

Dalam pada itu, dengan semangat kebangkitan nasional kedua dalam masa PJP II yang pada tingkat global ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan iptek diperlukan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dengan tetap mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih terikat oleh nilai-nilai tradisional yang tidak selalu mendukung kesiapan dan kematangan berpikir, bersikap dan bertindak secara terbuka dan maju, menghargai waktu, dan berani bersaing secara sehat. Budaya menulis, membaca, belajar, dan mengakrabkan diri dengan iptek belum tumbuh dengan subur pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya iptek guna mewujudkan kualitas bangsa yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia.

Penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan dari berpikir logis dan sistematis sehingga dapat mendukung upaya menumbuhkembangkan budaya iptek. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya digunakan masyarakat dengan baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga. Menurut sensus penduduk tahun 1990, dari penduduk usia lima tahun ke atas hanya sekitar 15 persen yang telah menggunakan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sekitar 17 persen yang tidak memahami Bahasa Indonesia, dan 68

persen yang telah memahami tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga ada keterbatasan dalam penerjemahan dan penulisan buku ilmiah, baik jumlah maupun mutunya. Sehubungan dengan itu, pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek seiring dengan penulisan dan penerbitan berbagai buku bermutu merupakan tantangan yang perlu dijawab dalam PJP II.

Pembinaan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan telah dapat membina kerukunan antar- dan antara sesama umat beragama dan antar- dan antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, masih terdapat kesulitan dalam membina para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak bersikap tertutup dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru serta sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini juga merupakan tantangan dalam pembangunan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kendala

Dalam upaya menjawab berbagai tantangan dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI mendatang, akan dihadapi berbagai kendala yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pembangunan kebudayaan nasional dan pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah: (a) rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat yang dapat mengakibatkan rendahnya daya saring dan daya tangkal terhadap pengaruh budaya asing yang negatif; (b) adanya kesulitan dari masyarakat berpendidikan rendah juga untuk menyerap dan mengembangkan nilai-nilai baru yang positif sehingga pada gilirannya dapat menghambat upaya mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia; (c) kurang mantapnya mekanisme penyaringan terhadap

penetrasi budaya luar yang negatif, baik melalui siaran televisi maupun media massa lainnya; (d) masih lemahnya peranan keluarga dalam menyemaikan, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai agama sejak dini, yang antara lain disebabkan oleh terjadinya pergeseran pola hidup dan kurang siapnya masyarakat dalam menghadapi proses transformasi struktural dari masyarakat agraris tradisional ke industri modern; (e) masih cukup banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial, yang hal ini akan menjadi lebih sulit apabila masyarakat yang lebih beruntung tidak mempunyai kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang merupakan kendala, bahkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa; (f) sulitnya upaya penggalian, pengkajian, dan pelestarian benda cagar budaya, khususnya benda cagar budaya dan situs yang berada di daerah pedalaman yang terpencil; (g) kurangnya tenaga teknis kebudayaan dan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, berikut sarana dan prasarananya untuk mengembangkan kebudayaan dan perpustakaan; dan (h) kendala khusus untuk pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masih terdapat sikap tertutupan untuk memberikan informasi guna keperluan pembinaan.

3. Peluang

Walaupun terdapat beberapa kendala sebagaimana disebutkan di atas, dalam upaya pengembangan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat berbagai peluang sebagai faktor pendukung, antara lain: (a) makin memasyarakatnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta makin mantapnya Wawasan Nusantara sebagai hasil kegiatan penataran P4; (b) budaya bangsa yang dinamis yang telah berkembang sepanjang

sejarah bangsa yang bercirikan kebhinnekaan dan keekaan bangsa; (c) corak ragam budaya bangsa yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai; (d) meningkatnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan yang dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; (e) bangsa Indonesia telah berabad-abad memiliki kebudayaan dan daya toleransi yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyerap pengaruh budaya asing yang positif; dan (f) makin meluasnya jangkauan penyebaran informasi termasuk pelayanan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai wahana penyebarluasan nilai-nilai luhur budaya dan iptek.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional terus digairahkan.

Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk pemahaman dan

pengamalan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya bangsa. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Perubahan dan pembaharuan struktur dan nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsa dan kebutuhan pembangunan terus digerakkan untuk memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan yang berdasarkan Pancasila.

Dalam pembangunan budaya nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing, mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Perlu terus ditumbuhkan budaya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, budaya ingin maju, dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang dapat mendukung proses pematapan budaya bangsa.

Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah yang positif dan harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Penyelenggaraannya harus dapat mencegah dan menghilangkan melebarnya kesenjangan sosial ekonomi dan sikap eksklusif serta harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian

bangsa. Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa, serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia.

Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.

Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa diusahakan agar mampu menampung dan

menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan seni budaya bangsa serta memberikan inspirasi dan gairah membangun. Kesenian daerah perlu dipelihara dan dikembangkan untuk melestarikan dan memperkaya keanekaragaman budaya bangsa. Upaya itu perlu didukung oleh iklim serta sarana dan prasarana yang memadai.

Nilai, tradisi, dan peninggalan sejarah, yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

Berkenaan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, GBHN 1993 menggariskan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar- dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, serta untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam PJP II sebagaimana dirumuskan dalam GBHN 1993 adalah makin mantap dan berkembangnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia dan makin kukuhnya jati diri dan kepribadian bangsa, serta terciptanya suasana kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh kerukunan yang dinamis antarpenganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang antara lain tercermin dengan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Repelita VI dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, sesuai amanat GBHN 1993 adalah meningkatnya penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan makin kukuhnya jati diri, kepribadian bangsa dan jiwa persatuan dan kesatuan, dan kebanggaan nasional, serta terwujudnya sikap maju dan mandiri melalui penanaman budaya iptek; makin mantapnya mekanisme penyaringan terhadap pengaruh kebudayaan yang negatif yang disebarluaskan melalui berbagai media; serta makin meningkatnya penyebaran informasi dan pertukaran budaya, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Sasaran pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepastakaan antara lain adalah makin meningkatnya pemakaian dan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta makin berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek; tersusunnya bahan bacaan bermutu yang digali dari naskah kuno, cerita rakyat dan sejarah kepahlawanan; makin meningkatnya penulisan dan penerjemahan berbagai buku bermutu; serta terselenggaranya pelayanan perpustakaan sampai ke perdesaan dalam rangka mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat.

Dalam pembinaan kesenian, sasaran yang akan dicapai, antara lain, adalah tergali dan terbinanya kesenian daerah yang hampir punah serta berkembangnya bentuk kesenian kreasi baru, terutama yang berakar pada puncak-puncak budaya daerah.

Sasaran pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman, antara lain, adalah terpilihnya tradisi, peninggalan sejarah, dan purbakala sebagai unsur pembentuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, serta makin meningkatnya fungsi museum sebagai tempat rekreasi dan lembaga pendidikan budaya, termasuk sebagai wahana pembudayaan iptek sejak dini.

Dalam hal pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sasaran pada Repelita VI sesuai amanat GBHN 1993 adalah makin meningkatnya kualitas kerukunan antar- dan antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatnya peran serta penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan. Menjadi sasaran pula terbinanya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan pelaksanaannya sesuai dengan Pancasila, terutama dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Kebijakanaksanaan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan arahan GBHN 1993, disusun serangkaian kebijakanaksanaan meliputi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya; pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepastakaan; pembinaan kesenian; pembinaan tradisi, peninggalan sejarah, dan permuseuman; dan pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diuraikan sebagai berikut.

a. Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, antara lain melalui pemahaman dan pengamalan nilai budaya daerah serta penyerapan nilai budaya asing yang positif sejalan dengan kemajuan dalam masyarakat, identifikasi peranan budaya sebagai pembentuk jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreativitas, keberadaban, budi pekerti dan akhlak mulia, tata krama, disiplin nasional, serta tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, terus ditingkatkan upaya membentuk masyarakat yang mempunyai sikap menghargai waktu, disiplin dan etos kerja produktif, mampu bekerja keras, dan berpikir kreatif melalui pendidikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Upaya memperkaya pengetahuan budaya peserta didik, terutama pada tingkat pendidikan dasar, dilakukan melalui pengkajian dan penyiapan materi bahan pengajaran, disertai dengan pengadaan buku pegangan bagi guru dan bahan bacaan untuk peserta didik yang bersumber pada adat-istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Penyebarluasan informasi kebudayaan yang didukung dengan suatu sistem pengolahan informasi yang andal terus dilakukan sehingga mampu menyediakan informasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga setiap saat dapat memberikan layanan informasi kebudayaan untuk berbagai kepentingan nasional, regional, dan internasional. Dalam penyebarluasan informasi kebudayaan tersebut, juga dikembangkan komunikasi pemikiran budaya yang diarahkan untuk mempersiapkan pengembangan suatu pranata budaya masyarakat industri bagi warga negara Indonesia. Dalam hal itu, peran lembaga komunikasi, baik Pemerintah maupun masyarakat terus didorong dan ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam memelihara dan mengembangkan peradaban bangsa sebagai pembentuk jati diri bangsa.

Kerjasama dan koordinasi antarlembaga, baik Pemerintah maupun swasta secara nasional, regional, dan internasional ditingkatkan terutama untuk meningkatkan citra budaya bangsa yang luhur dengan meningkatkan fungsi berbagai kekayaan budaya bangsa untuk mendukung pembangunan.

Pembauran bangsa yang dilakukan melalui segenap bidang kehidupan dalam rangka memperluas cakrawala dan aspirasi budaya bangsa dan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa terus dibina dan dipacu ke arah yang positif dan dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Penyelenggaraannya terus diarahkan untuk mencegah dan menghilangkan melebarnya kesenjangan ekonomi dan sikap eksklusif serta untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

b. Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan

Bahasa Indonesia sebagai pembentuk jati diri bangsa, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa nasional yang merupakan sarana komunikasi serta sarana pengembangan iptek dibina dan dikembangkan. Upaya yang dilakukan, antara lain, adalah pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar di berbagai lapisan masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta. Di samping itu, penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan budaya dilestarikan guna memperkaya khasanah budaya bangsa. Sehubungan dengan itu, diupayakan pengembangan mata ajaran bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia sebagai salah satu sumber falsafah bangsa dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai budaya luhur lama dan baru demi pengembangan kebudayaan nasional terus ditingkatkan. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ditingkatkan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Dalam rangka itu, didorong dan ditingkatkan partisipasi tenaga ahli dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Kemampuan penguasaan bahasa asing sebagai wahana penyerapan dan penguasaan iptek serta untuk memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan ditingkatkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah. Dampak negatif penggunaan bahasa asing terhadap pembinaan bahasa Indonesia dihindari, antara lain dengan cara menghindarkan pemakaian kata ataupun istilah asing yang telah mempunyai padanan bahasa Indonesia dan menertibkan pemakaian bahasa asing agar sesuai dengan tempat dan kebutuhannya.

c. Pembinaan Kepustakaan

Kesempatan membaca buku bagi masyarakat diperluas sehingga mendukung upaya mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang makin berbudaya tinggi, maju, dan mandiri. Sehubungan dengan itu, kepastakaan dan perpustakaan serta kearsipan terus ditingkatkan agar lebih merata dan bermutu serta menjangkau segenap lapisan masyarakat termasuk masyarakat di perdesaan. Upaya meningkatkan mutu perpustakaan dilakukan untuk semua jenis perpustakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah dan mutu pustakawan dan mengembangkan kerja sama antarperpustakaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Selain itu, diversifikasi fungsi perpustakaan dikembangkan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas.

Sehubungan dengan berbagai kegiatan di atas, penerjemahan berbagai buku kebudayaan dan iptek berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ditingkatkan guna meningkatkan wawasan budaya dan penguasaan iptek serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara lain.

d. Pembinaan Kesenian

Pembinaan kesenian diarahkan pada upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, meningkatkan kebanggaan nasional, mengungkapkan kehalusan perasaan dan keindahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesenian daerah terutama yang hampir punah dibina dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan kesenian masa kini diarahkan agar berakar kuat pada budaya luhur bangsa.

Pendidikan kesenian sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional dilakukan melalui pendidikan sekolah, pameran, dan pementasan karya seni dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan kreatif. Peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam membina dan mengembangkan kesenian didorong dan ditingkatkan.

Dalam pada itu, pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kesenian yang tumbuh di masyarakat ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan karya seni bermutu dalam rangka memperkaya budaya bangsa.

Upaya meningkatkan citra kesenian Indonesia sebagai penunjang program kepariwisataan dan diplomasi bermatra kebudayaan dilakukan antara lain melalui penyebarluasan informasi kesenian ke luar negeri dan tukar-menukar misi kesenian dengan negara lain.

e. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Permuseuman

Upaya melestarikan dan melindungi berbagai bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai kekayaan budaya dan kebanggaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui pengamanan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan kerusakan, pencurian, penyelundupan, dan perdagangan benda tersebut, serta penyuluhan mengenai pentingnya nilai peninggalan purbakala untuk meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat. Untuk itu, kerja

sama antarlembaga pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri terus dikembangkan.

Fungsi dan peranan museum dikembangkan tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, tetapi juga sebagai wahana penelitian dan pendidikan budaya serta pengenalan dan pemahaman mengenai jati diri bangsa terutama bagi generasi muda. Museum iptek juga dikembangkan dalam rangka penanaman dan pengembangan budaya iptek sejak dini.

Guna mengembangkan jiwa kejuangan dan kebanggaan nasional serta semangat cinta tanah air dilakukan perekaman, penulisan, dan penyebaran peristiwa perjuangan dalam sejarah dan biografi para tokoh sejarah serta penulisan bahan ajar sejarah yang mencerminkan nilai-nilai kejuangan untuk keperluan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

f. Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah-langkah agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berlangsung menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemeliharaan kerukunan antar dan antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif penganut akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan penggarisan yang telah ditetapkan dalam GBHN 1993 dan kebijaksanaan serta sasaran tersebut di atas disusun program pokok dan penunjang dalam Repelita VI sebagai berikut.

1. Program Pokok

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Program ini bertujuan untuk mengungkapkan, menanamkan, dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Lingkup kegiatan yang akan dilakukan meliputi, antara lain, usaha-usaha inventarisasi, penelitian, pengkajian, pendidikan, dan pengungkapan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kegiatan penelitian kebudayaan daerah yang akan dilakukan meliputi antara lain tata krama, disiplin, adat-istiadat dan nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat, permainan rakyat, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, dan norma sosial serta pandangan masyarakat. Hasil dari kegiatan tersebut akan dimanfaatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, antara lain, melalui media massa dan pranata sosial yang hidup di masyarakat dan lembaga pendidikan, serta pariwisata.

Dalam upaya mengembangkan kebudayaan masa kini yang berakar pada budaya bangsa akan dilakukan pelayanan informasi kepada masyarakat luas melalui pameran dan peragaan budaya serta penelitian dampak kebudayaan masa kini terhadap anak, remaja, pemuda, wanita, dan kehidupan keluarga. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan nilai-nilai budaya yang mendukung produktivitas, efisiensi, dan etos kerja

produktif dan pengembangan iptek dilakukan pemelajaran dan pengkajian budaya tentang pengembangan jati diri dan kepribadian bangsa, lomba dan sayembara penulisan naskah kebudayaan serta festival kebudayaan bagi para remaja, pemuda, dan masyarakat luas. Selain itu, akan dikembangkan sistem informasi kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka merangsang kreativitas para budayawan dikembangkan iklim dan kondisi yang mendukung, antara lain dengan memberikan penghargaan kepada budayawan yang kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu, serta kesempatan menggelar hasil karyanya secara bertanggung jawab. Peran serta dunia usaha dalam hal ini didorong dan ditingkatkan.

b. Program Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan

Program ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dalam upaya membina bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern yang dapat berperan sebagai sarana komunikasi nasional dan wahana pengembangan iptek. Program itu meliputi penelitian tentang berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah, serta penelitian dan pengembangan sistem pengajaran bahasa dan sastra nasional, sastra daerah, dan sastra asing.

Upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui pembakuan kebahasaan, penyempurnaan tata bahasa baku bahasa Indonesia, penyempurnaan dan penyusunan kamus antara lain kamus iptek dan kamus bahasa daerah, bimbingan dan penyuluhan, serta pemberian penghargaan bagi karya bahasa dan sastra yang bermutu. Penulisan dan penerjemahan berbagai buku bahasa, sastra, dan iptek yang bermutu akan dilakukan dalam upaya mempercepat alih iptek dan memperkaya bahasa nasional, kesastraan, dan pustaka Indonesia.

Bahasa dan sastra daerah akan dibina dan dikembangkan, antara lain, melalui pemetaan dan pelestarian bahasa daerah, peningkatan penghayatan dan penghargaan masyarakat terhadap karya sastra daerah, penyusunan naskah dan pengadaan buku bacaan sastra anak-anak yang mengandung nilai-nilai budaya dan sastra daerah dan Nusantara, lomba kesastraan bagi remaja, pemuda dan masyarakat luas, dan pemberian penghargaan karya sastra yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan penguasaan bahasa asing melalui jalur sekolah dan luar sekolah diupayakan penyediaan bahan tambahan untuk pelatihan tenaga pendidik bahasa asing. Upaya mengurangi pengaruh negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia akan dilakukan melalui penertiban pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan berbagai media massa.

c. Program Pembinaan Kepustakaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat. Dalam Repelita VI kegiatan yang dilakukan adalah memantapkan mutu pelayanan sistem nasional perpustakaan sehingga makin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan perpustakaan desa, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, serta perpustakaan lembaga-lembaga lainnya. Di samping itu, ditingkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan melalui jaringan kerja sama lembaga perpustakaan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pengembangan fungsi dan peran perpustakaan daerah melalui diversifikasi jenis dan layanan perpustakaan dilakukan terutama untuk mengembangkan minat belajar anak-anak dan remaja.

d. Program Pembinaan Kesenian

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan daya cipta anggota masyarakat, khususnya para seniman, memperluas apresiasi seni

masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati seni budaya bangsa. Untuk itu, akan dilakukan kerja sama pembinaan dan diupayakan pemberian bantuan kepada lembaga dan organisasi kesenian serta penghargaan kepada seniman.

Pembinaan kesenian didukung oleh kegiatan penggalan, pengolahan, pendokumentasian, perekaman, dan penelitian kesenian dalam rangka melestarikan, memelihara, dan mengembangkan kesenian daerah dan kesenian nasional. Untuk itu, dilakukan pula kegiatan operasi dan perawatan fasilitas taman-taman budaya serta sarana dan prasarana lainnya guna meningkatkan dayaguna dan hasil gunanya. Sementara itu, dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan potensi serta kreativitas seniman diberikan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, dan temu seniman.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama kesenian dengan berbagai pihak di luar negeri dilakukan pengiriman duta seni, pameran dan sayembara seni di luar negeri dengan mengikutsertakan masyarakat terutama dunia usaha.

e. Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman

1) Pengkajian dan Penanaman Kesadaran Sejarah

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya pembinaan kebudayaan nasional yang berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai kesejarahan yang tetap mempunyai dinamika yang tinggi. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi penelitian sejarah untuk mengungkapkan sejarah bangsa, pemikiran, dan keteladanan para tokoh masyarakat dan sejarah.

Penelitian kesejarahan bertujuan untuk merekam dan menjernihkan masalah kesejarahan yang hidup dalam masyarakat

dan antara lain dilakukan melalui pengungkapan nilai-nilai tradisi sejarah untuk memupuk kebanggaan nasional serta menghidupkan keteladanan para tokoh sejarah nasional. Dalam upaya mendukung pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat dilakukan antara lain inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional yang meliputi penelitian berbagai aspek kesejarahan nasional dan daerah.

Mengingat pelajaran sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah sangat terbatas mengenai kawasan timur Indonesia, dilakukan penelitian sejarah khusus untuk kawasan tersebut.

2) Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan

Program ini ditujukan untuk melestarikan dan memanfaatkan bukti-bukti peninggalan sejarah dan keurbakalaan untuk menunjang program pendidikan guna mempertinggi rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional serta memperkaya budaya bangsa dan mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam upaya melindungi dan melihara objek peninggalan sejarah dan purbakala dilakukan berbagai studi kelayakan, studi teknis, rehabilitasi, dan pemugaran terhadap bangunan di situs sejarah dan purbakala seperti di kompleks percandian, masjid, gereja, pura, makam kuno, dan rumah adat.

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya diberikan bimbingan, penyuluhan, ceramah, dan penyebaran informasi melalui media massa cetak dan elektronik.

Dalam upaya menggali dan menyelamatkan benda cagar budaya bawah air sebagai sumber daya budaya dan mata rantai sejarah yang sangat penting untuk memahami sejarah kemaritiman Indonesia, akan dilakukan penelitian dan pengkajian serta upaya pengamanannya.

3) Pembinaan Permuseuman

Pembinaan permuseuman bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi museum sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan rekreasi edukatif yang mendukung peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, kepariwisataan, dan penanaman budaya iptek sejak usia dini. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi antara lain pematapan sistem permuseuman dan pemasyarakatan peraturan tentang permuseuman, pelestarian dan pengamanan benda budaya, pengembangan museum nasional sebagai pusat studi warisan budaya dan pusat informasi sejarah agar mampu menjadi museum bertaraf internasional, serta perintisan pengembangan museum iptek untuk mengembangkan budaya iptek sejak dini. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan pula kegiatan operasi dan perawatan untuk fasilitas museum-museum-propinsi.

4) Penelitian Purbakala

Penelitian purbakala bertujuan untuk mengungkapkan data kepurbakalaan, menyelamatkan peninggalan budaya masa lampau sebagai dasar bagi upaya membuka cakrawala wawasan budaya bangsa. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi penggalian, penelitian, dan publikasi hasil-hasil penelitian.

f. Program Pembinaan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program ini bertujuan untuk membina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kehidupan kerukunan antarpenganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah inventarisasi dan dokumentasi ajaran-ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Program Penunjang

a. Program Pembinaan Anak dan Remaja

Program pembinaan anak dan remaja ditujukan untuk mempersiapkan anak dan remaja agar mengenal, mendalami, dan menghayati nilai-nilai luhur budaya bangsa sejak usia dini guna memperkuat kepribadiannya. Program ini dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah termasuk pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa penyebaran cerita rakyat, peragaan budaya daerah dan permainan rakyat yang sesuai dengan perkembangan anak dan remaja, serta bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat.

b. Program Pembinaan Pemuda

Program pembinaan pemuda bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi kader pimpinan bangsa yang tangguh, ulet, dan mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara serta mempunyai ketahanan budaya yang andal. Untuk itu, dilakukan kegiatan meningkatkan etos kerja, kemauan, dan kesadaran memperkuat mental kejuangan dan kepeloporan serta kepatriotan, mendorong aktivitas dan kreativitas seni pemuda, menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial, disiplin nasional, budaya gemar membaca dan rasa hormat terhadap generasi terdahulu, serta meningkatkan apresiasi dan sikap pemuda terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa. Untuk itu, dilakukan bimbingan, penyuluhan, ceramah, lomba, sayembara, pameran, dan peragaan budaya.

c. Program Peranan Wanita

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri wanita Indonesia sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan nasional

sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui berbagai kegiatan pendidikan kebudayaan baik di sekolah dan luar sekolah maupun melalui media massa.

d. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan dalam mendidik, melatih, dan mengelola kebudayaan baik teknis maupun administratif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebudayaan, serta meningkatkan wawasan budaya masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain mencakup pelatihan tenaga teknis kebudayaan dan perencanaan pengembangan sumber daya kebudayaan secara terpadu, serta penyuluhan kepada masyarakat, termasuk penyuluhan tentang perundang-undangan kebudayaan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

VI. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA VI

Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-program tersebut, yang merupakan program dalam bidang kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dibiayai dengan anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95 - 1998/99) adalah sebesar Rp 338.460,0 juta. Rencana anggaran pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk tahun pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, sub sektor dan program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel 33-1.

Tabel 33-1

**RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
Tahun Anggaran 1994/95 dan Repelita VI (1994/95 - 1998/99)**

(dalam juta rupiah)

No. Kode	Sektor/Sub Sektor/Program	1994/95	1994/95 - 1998/99
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
11.3	Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa		
11.3.01	Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	7.000,0	46.300,0
11.3.02	Program Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan	13.250,0	85.550,0
11.3.03	Program Pembinaan Kesenian	8.000,0	50.910,0
11.3.04	Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman	24.000,0	152.400,0
11.3.05	Program Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	500,0	3.300,0

X. 1

**Perpustakaan
Jenderal Ke**

348.5

DE

r